

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1.PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

##### **1. UMUM**

Bertitik tolak pada arti dan ruang lingkup keuangan Daerah, maka dikemukakan bahwa keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Oleh karena itu keuangan Daerah meliputi pendapatan dan belanja Daerah yang merupakan rencana Keuangan Tahunan Daerah sebagai suatu rencana operasional tahunan, oleh karena itu APBD berisi pemikiran atau tafsiran yang diharapkan dapat direalisasikan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, merupakan Indikator keberhasilan dari yang ditetapkan.

##### **2. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 tercatat sebesar Rp.889.459.522.942,97 ada kenaikan sebesar Rp.63.240.322.342,97 atau 7,65% dari plafond perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 yang ditetapkan sebesar Rp.826.219.200.600,00.

Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah secara garis besar dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)
I.	Pendapatan Daerah	826.219.200.600,00	889.459.522.942,97	63.240.322.342,97
II.	Belanja Daerah	903.782.000.001,00	840.513.196.973,52	( 63.268.803.027,48 )
	Surplus/(Defisit)	(77.562.799.401,00)	48.946.325.969,45	
III.	Pembiayaan Daerah	77.562.799.400,00	77.808.129.605,55	
a.	Penerimaan Daerah	93.562.799.400,00	93.808.129.605,55	245.330.205,55
b.	Pengeluaran Daerah	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	-
	- Transfer ke Dana Cadangan	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-
	- Penyertaan Modal	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-
	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-	-
	- Kelebihan Pembayaran Pembiayaan	-	-	-
	Total Pend. (I+III.a)	919.782.000.000,00	983.267.652.548,52	
	Total Bel. (I+III.b)	919.782.000.001,00	856.513.196.973,52	

Selanjutnya sesuai struktur APBD berikut disajikan uraian tentang realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah sebagai berikut :

#### a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp.215.751.228.557,91 atau 114,17% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.188.969.200.600,00

Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp.673.708.294.385,08 atau 105,72% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.637.250.000.000,00 sedangkan untuk pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah realisasinya pada tahun ini masih nihil.

Tabel 2  
Realisasi Pendapatan Daerah pada Perhitungan APBD  
Tahun Anggaran 2006

Jenis	Tahun Anggaran 2006		Bertambah/ (Berkurang)	%
	Anggaran	Realisasi		
1. Pendapatan Asli Daerah	188.969.200.600,00	215.751.228.557,91	26.782.027.957,91	114,17
2. Dana Perimbangan	637.250.000.000,00	673.708.294.385,06	36.458.294.385,06	105,72
3. Pinjaman Daerah	-	-	-	-
4. Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
Jumlah	826.219.200.600,00	889.459.522.942,97	63.240.322.342,97	107,65

### 1) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) :

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp.215.751.228.557,91 atau 114,17% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.188.969.200.600,00 bila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dalam APBD, maka kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun ini sudah mencapai sebesar 24,25%. Berbagai faktor pendukung turut mempengaruhi tingkat pencapaian target PAD antara lain faktor kebijakan seperti upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, faktor kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap kewajibannya membayar pungutan daerah serta upaya yang optimal para aparat terkait dalam rangka pengamanan target PAD yang ditetapkan. Secara garis besar gambaran realisasi PAD dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3  
Realisasi PAD pada Perhitungan APBD  
Tahun Anggaran 2006

Jenis	Tahun Anggaran 2006		Bertambah/ (Berkurang)	%
	Anggaran	Realisasi		
1. Pajak Daerah	159.304.500.000,00	177.793.231.043,00	18.488.731.043,00	111,61
2. Retribusi Daerah	12.680.700.600,00	17.528.749.612,00	4.848.049.012,00	138,23
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.095.000.000,00	7.096.249.626,53	1.249.626,53	100,02
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.889.000.000,00	13.332.998.276,38	3.443.998.276,38	134,83
Jumlah	188.969.200.600,00	215.751.228.557,91	26.782.027.957,91	114,17

Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi PAD disampaikan berikut ini.

**a) Pajak Daerah**

Realisasi penerimaan Pajak Daerah seperti nampak pada Tabel tersebut diatas berjumlah sebesar Rp.177.793.231.043,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.159.304.500.000,00 terlampauinya target tersebut mencapai Rp.18.488.731.043,00 atau 111,61% dari target semula sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2006 kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD mencapai 97,83%. Penerimaan Pajak Daerah tersebut diperoleh dari :

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor, realisasinya sebesar Rp.43.813.760.515,- atau 103,09% dari target sebesar Rp.42.500.000.000,-
- (2) Pajak Kendaraan di atas Air, realisasinya sebesar Rp.3.268.850,00 atau 65,37% dari target sebesar Rp.5.000.000,00
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, realisasinya sebesar Rp.61.346.343.850,00 atau 105,55% dari target sebesar Rp.58.120.000.000,00

- (4) Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air, realisasinya sebesar Rp.8.172.900,00 atau 163,45% dari target sebesar Rp.5.000.000,00
- (5) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, realisasinya sebesar Rp.72.386.856.158,00 atau 123,95% dari target sebesar Rp.58.399.500.000,00
- (6) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air dibawah tanah, realisasinya sebesar Rp.38.253.450,00 atau 30,60% dari target sebesar Rp.125.000.000,00
- (7) Pajak Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, realisasinya sebesar Rp.196.575.320,00 atau 131,05% dari target sebesar Rp.150.000.000,00

Gambaran realisasi Pendapatan Daerah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4  
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada Perhitungan  
APBD Tahun Anggaran 2006

Jenis	Tahun Anggaran 2006		Bertambah/ (Berkurang)	%
	Anggaran	Realisasi		
1. Pajak Kendaraan Bermotor	42.500.000.000,00	43.813.760.515,00	1.313.760.515,00	103,09
2. Pajak Kendaraan di Atas Air	5.000.000,00	3.268.850,00	(1.731.150,00)	65,38
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	58.120.000.000,00	61.337.680.250,00	3.217.680.250,00	105,54
4. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air	5.000.000,00	8.172.900,00	3.172.900,00	163,46
5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	58.399.500.000,00	72.386.856.158,00	13.987.356.158,00	123,95
6. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air di Bawah Tanah	125.000.000,00	38.253.450,00	(86.746.550,00)	30,60
7. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	150.000.000,00	196.575.320,00	46.575.320,00	131,05
Jumlah	159.304.500.000,00	177.784.567.443,00	18.480.067.443,00	111,60

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah per jenis dapat diuraikan sebagai berikut :

**(1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 realisasinya melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.43.813760.515,00 atau 105,09% dari targetnya sebesar Rp.42.500.000.000,00. Namun apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp.522.424.115,00 terjadi kenaikan penerimaan sebesar 3,11% pada tahun ini. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah secara keseluruhan sebesar Rp.159.304.500.000,00 maka kontribusi pendapatan PKB terhadap Pajak Daerah mencapai 0,32% melampaui target tersebut pada tahun anggaran ini lebih disebabkan karena adanya kesadaran pembayar pajak sebagai objek PKB, sehingga realisasinya belum dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

**(2) Pajak Kendaraan diatas Air**

Pajak Kendaraan diatas Air sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 realisasinya mencapai sebesar Rp.3.268.850,00 atau 65,38% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 sehingga pada perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006. Realisasi Penerimaan dari pajak ini berkurang sebesar Rp.1.731.150,- atau 34,62% disebabkan perubahan angkutan sungai diganti dengan angkutan darat.

**(3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)**

Realisasi pendapatan BBN-KB sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai sebesar Rp.61.337.680.250,00 atau 105,54% dari target yang ditetapkan Rp.58.120.000.000,00 sehingga pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 ini realisasi penerimaan BBN-KB berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp.3.217.680.250,00 atau 5,53%. Bila dibandingkan dengan

realisasi penerimaan Pajak Daerah secara keseluruhan sebesar Rp.177.793.231.043,00 maka kontribusi BBN-KB terhadap Pajak Daerah jumlahnya cukup signifikan yaitu mencapai 1,80%.

Tercapainya angka realisasi penerimaan BBN-KB sebesar tersebut diatas tentunya sangat dipengaruhi oleh tumbuhnya produk-produk kendaraan baru yang mendapat respon positif dari masyarakat serta adanya kebijakan pemerintah Pusat tentang deregulasi impor kendaraan bermotor yang masih dipertahankan.

#### **(4) Bea Balik Nama Kendaraan diatas Air**

Realisasi penerimaan sampai akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai sebesar Rp.8172.900,00 atau 163,46% dari target yang ditetapkan Rp.5.000.000,00 sehingga pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 ini realisasi penerimaan pajak ini berhasil melampaui target sebesar Rp.3.172.900,00 atau 63,46%. Bila dibanding dengan realisasi penerimaan pajak Daerah secara keseluruhan, maka kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan diatas Air terhadap pajak Daerah mencapai 0,04%.

#### **(5) Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor (PBB-KB)**

Realisasi penerimaan PBB-KB sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai sebesar Rp.72.386.856.158,00 atau 123,95% dari target yang ditetapkan Rp.58.399.500.000,00 sehingga pada perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 ini realisasi penerimaan Pajak ini berhasil melampaui target sebesar Rp.13.987.356.158,00 atau 23,95%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah secara keseluruhan, maka kontribusi PBB-KB terhadap Pajak Daerah mencapai 7,86%.

Keberhasilan pencapaian target penerimaan PBB-KB yang cukup signifikan ini disebabkan karena adanya

peningkatan konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor oleh masyarakat luas, adanya pengaruh kenaikan harga BBM, serta adanya upaya koordinasi secara intensif dengan pihak Pertamina sebagai penghimpun hasil pemungutan PBB-KB sehingga hasilnya dapat tercapai secara optimal.

**(6) Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air di Bawah Tanah (PP ABT)**

Realisasi pendapatan Pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai sebesar Rp.38.253.450,00 atau hanya mencapai 30,60% dari target yang ditetapkan Rp.125.000.000,00 sehingga pada perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 realisasi penerimaan dari pajak ini mengalami kekurangan sebesar Rp.86.746.550,00 atau 69,40% dari target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan Pajak Daerah secara keseluruhan yang jumlahnya mencapai Rp.177.793.231.043,00 maka kontribusi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air dibawah Tanah hanya sebesar 0,05%. Tidak tercapainya target P3 ABT disebabkan antara lain karena tingkat kesadaran dari Wajib Pajak yang masih rendah, serta lemahnya dan terbatasnya aparat pungutan yang ada dilapangan, sehingga kedepan untuk peningkatan pendapatan dari Sektor Pajak ini diharapkan upaya penyuluhan yang berkelanjutan kepada masyarakat, serta penyediaan personil yang memadai untuk hal tersebut dapat lebih ditingkatkan lagi.

**(7) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3 AP)**

Realisasi pendapatan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai sebesar Rp.196.575.320,00 atau 131,05% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.150.000.000,00. Dengan demikian pada perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 penerimaan Pajak ini berhasil

melampaui target sebesar Rp.46.575.320,00 atau 31,05%. Bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan Pajak Daerah secara keseluruhan, maka kontribusi P3 AP terhadap Pajak Daerah mencapai 0,02%. Terlampauinya target penerimaan Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan ini secara umum dipengaruhi oleh stabilitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

**b) Retribusi Daerah :**

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah, dipungut atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat, Untuk kepentingan pribadi atau badan baik bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu. Retribusi Daerah dipungut dari masyarakat sebagai pembayaran atas pelayanan dengan pengupayakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Realisasi penerimaan retribusi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai sebesar Rp.17.528.749.612,00 atau 138,23% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.12.680.700.600,00 sehingga pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 ini realisasi penerimaannya berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp.4.808.049.012,00 atau 38,23%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD secara keseluruhan sebesar Rp.215.751.228.557,91 maka kontribusi pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai 8,12%.

Tercapainya target penerimaan Retribusi Daerah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 ini pada dasarnya dikarenakan target yang ditetapkan sesuai potensi yang ada. Rincian realisasi penerimaan Retribusi Daerah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 digambarkan pada Tabel 5 :

Tabel 5  
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Perhitungan APBD  
Tahun Anggaran 2006

Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2006		Bertambah/ (Berkurang)	%
	Anggaran	Realisasi		
1. Pelayanan Kesehatan	11.704.200.600,00	16.118.722.737,00	4.414.522.137,00	137,72
2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	775.000.000,00	1.256.085.250,00	481.085.250,00	162,08
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	75.000.000,00	38.230.000,00	(36.770.000,00)	50,97
4. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	104.000.000,00	105.081.625,00	1.081.625,00	101,04
5. Retribusi Perijinan	22.000.000,00	10.630.000,00	(11.370.000,00)	48,32
Jumlah	12.680.200.600,00	17.528.749.612,00	4.848.549.012,00	138,24

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi per jenis Retribusi Daerah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 antara lain sebagai berikut :

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai sebesar Rp.16.118.722.737,00 atau 137,72% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.11.704.200.600,00 sehingga pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 ini realisasinya berhasil melampaui target sebesar Rp.4.414.521.737,00 atau 37,71%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Retribusi Daerah secara keseluruhan, maka kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Retribusi Daerah sangat signifikan yaitu mencapai 25,18%.

Terlampauinya target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan ini selain karena adanya peningkatan kualitas pelayanan pada RS. Doris Sylvanus juga disebabkan karena adanya penerimaan cukup besar dari PHB/ASKES yang jumlah mencapai dua kali lebih besar dari yang ditargetkan semula atau 195.13%.

(2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai sebesar Rp.1.256.085.250,00 atau 162,08% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.775.000.000,00 sehingga pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 ini realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah melampaui target Rp.481.085.250,00 atau 62,07%. Bila dibandingkan dengan total realisasi penerimaan Retribusi Daerah, maka kontribusinya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebesar 7,16%.

Melampaui target realisasi Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah disebabkan karena peningkatan sewa Laboratorium dan sewa Gedung/Ruangan/Aula dan Asrama dari target semula.

(3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Realisasi penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai sebesar Rp.38.230.000,00 atau 50,97% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.75.000.000,- sehingga pada perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 ini tidak mencapai target, karena kondisi dunia usaha melemah. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Retribusi Daerah secara keseluruhan, maka kontribusi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta terhadap Retribusi Daerah mencapai 0,21%.

Penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta terkait dengan pelayanan Pemerintah Daerah untuk menerbitkan peta bagi pihak yang memerlukan untuk kepentingan usahanya, dengan demikian penerimaan ini tidak tercapai karena berkurangnya pihak yang memerlukan layanan pencetakan peta.

(4) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Realisasi pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran mencapai sebesar Rp.105.081.625,00 atau 101,04% dari target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2006 Rp.104.000.000,00

Terlampauinya target penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah disebabkan karena transaksi atas hasil penjualan produksi usaha daerah di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan target yang diharapkan.

(5) Retribusi Perijinan

Realisasi Pendapatan Retribusi Perijinan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp.10.630.000,00 atau 48,32% dari target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.22.000.000,00 sehingga dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan penerimaan Retribusi Daerah secara keseluruhan, maka kontribusi Perijinan terhadap Retribusi Daerah hanya mencapai 0,06%.

Penerimaan Retribusi ini sangat tergantung Ijin yang dikeluarkan untuk kendaraan umum agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

**c) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :**

Pendapatan yang berasal dari Hasil Perusahaan Milik daerah dan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2006 realisasinya mencapai sebesar Rp.7.096.249.626,53 atau 100,02% dari target pendapatan sebesar Rp.7.095.000.000,00 Sehingga pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 realisasi mencapai target yang telah ditetapkan. Kontribusi dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Kekayaan Daerah yang

dipisahkan Tahun Anggaran 2006 sebesar 0,01% jika dibandingkan dari jumlah PAD Tahun Anggaran 2006.

Realisasi penerimaan dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 digambarkan pada tabel 6

Tabel 6  
Realisasi Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006

Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah/ (Berkurang)	%
	Anggaran	Realisasi		
1. Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur	825.000.000,00	825.000.000,00	-	100,00
2. PT. Bank Pembangunan Kalteng	6.270.000.000,00	6.271.249.626,53	1.249.626,53	100,02
Jumlah	7.095.000.000,00	7.096.249.626,53	1.249.626,53	100,02

Lebih lanjut mengenai realisasi pendapatan masing-masing objek penerimaan dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagai berikut :

#### **(1) BAGIAN LABA USAHA PERUSAHAAN MILIK DAERAH (PD)**

Target pendapatan bagian Laba Usaha Daerah untuk Perusahaan Daerah ( PD ) Tahun Anggaran 2006 ditargetkan sebesar Rp.825.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.825.000.000,- atau 100%. Kontribusi penerimaan ini bila dibandingkan dengan keseluruhan realisasi penerimaan Hasil perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan maka kontribusinya sebesar 10,97%.

#### **(2) BAGIAN LABA LEMBAGA KEUANGAN**

Setoran bagian laba dari Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Kalteng pada Tahun Anggaran

2006 ditargetkan sebesar Rp.6.270.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.6.271.249.626,00 atau 100,2%. Kontribusi yang berasal dari bagian laba Lembaga Keuangan Bank adalah 88,37% dari seluruh pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

**d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.**

Kelompok pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp.13.332.998.276,38 atau 134,82% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.9.889.000.000,00

Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 penerimaan kelompok ini berhasil melampaui target sebesar Rp.3.443.998.276,00 atau 34,82%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi PAD yang jumlahnya mencapai sebesar Rp.215.751.228.557,91 maka kontribusi lain-lain Pendapatan Asli Daerah terhadap PAD mencapai 6,60% Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 digambarkan pada Tabel 7.

Tabel 7  
Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006.

Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah/ (Berkurang)	%
	Anggaran	Realisasi		
1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	775.000.000,00	1.317.803.779,57	542.803.779,57	170,04
2. Pendapatan Jasa Giro	5.500.000.000,00	8.093.158.632,00	2.593.158.632,00	147,15
3. Pendapatan Bunga Deposito	650.000.000,00	806.384.985,00	156.384.985,00	124,06
4. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	278.321.210,00	78.321.210,00	139,16
5. TP-TGR	594.000.000,00	293.748.369,81	(300.251.630,19)	49,45
6. Sumbangan dari Pihak Ketiga	2.060.000.000,00	2.518.481.300,00	458.481.300,00	122,26
7. Penerimaan Lain-lainnya	25.000.000,00	25.100.000,00	100.000,00	100,40
8. Penerimaan PT. Kalteng Pos	85.000.000,00	-	(85.000.000,00)	-
Jumlah	9.889.000.000,00	13.332.998.276,38	3.443.998.276,38	134,83

Penjelasan lebih lanjut realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 antara lain sebagai berikut :

(1) Hasil Penjualan Asset Daerah yang tidak dipisahkan.

Hasil Penjualan Asset Daerah yang tidak dipisahkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai sebesar Rp.1.317.803.779,57 atau 170.04% dari target yang ditetapkan Rp.775.000.000,00

Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 melampaui target sebesar Rp.542.803.779,00 atau 70,04%.

Bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara keseluruhan, maka terlihat kontribusi penerimaan Hasil Penjualan Asset Daerah yang tidak dipisahkan ditetapkan mencapai 3,14%.

Dalam rangka pencapaian target realisasi penerimaan Hasil Penjualan Asset Daerah yang tidak dipisahkan upaya yang dilakukan antara lain :

- (a) Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas Tahap II dan Tahap III yang pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 012/310/BP tanggal 24 Desember 1998 tentang Penjualan Rumah Dinas Golongan II beserta ganti rugi atas tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Nomor 346 Tahun 2002 tentang Penjualan Rumah Dinas Golongan III dan atau ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (b) Penjualan kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 yang realisasinya ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 363 Tahun 2002 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Realisasi pendapatan Hasil Penjualan Asset Daerah yang tidak dipisahkan pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 digambarkan pada Tabel 8 :

Tabel 8  
Realisasi pendapatan Hasil Penjualan Asset Daerah yang tidak Dipisahkan pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006

Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah/ (Berkurang)	%
	Anggaran	Realisasi		
1. Penjualan Rumah Jabatan/Dinas	750.000.000,00	778.717.945,00	28.717.945,00	103,83
2. Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2	5.000.000,00	3.568.000,00	(1.432.000,00)	71,36
3. Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4	20.000.000,00	24.400.000,00	4.400.000,00	122,00
4. Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	511.117.834,57	511.117.834,57	-
Jumlah	775.000.000,00	1.317.803.779,57	542.803.779,57	170,04

(2) Jasa Giro

Realisasi pendapatan Jasa Giro sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai sebesar Rp.8.093.158.632,00 atau 147,15%, dari target yang ditetapkan sebesar Rp.5.500.000.000,00 Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 terlihat adanya pelampauan pendapatan dari target Rp.2.593.158.632,00 atau 47,15%.

Terlampauinya target penerimaan Jasa Giro tersebut bersumber dari penerimaan Jasa Giro yang berasal dari Jasa Giro para Pemegang Kas

(3) Penerimaan Bunga Obligasi.

Penerimaan Bunga Obligasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 realisasinya mencapai sebesar Rp.806.384.985,00 atau 124,06% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.650.000.000,00.

Realisasi Penerimaan Bunga Obligasi tersebut tidak termasuk pokok obligasi dari Pemerintah yang telah jatuh tempo, sehingga murni bunga obligasi sebesar Rp.806.384.985,00 dengan demikian maka realisasi untuk bunga obligasi melampaui target yang ditetapkan.

Apabila realisasi Penerimaan Bunga Obligasi murni tersebut dibandingkan dengan pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah, maka terlihat kontribusinya terhadap lain-lain Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai 0,37%.

(4) Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai sebesar Rp.278.321.210,00 atau 139,16% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.200.000.000,00 Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006

terjadi pelampauan pendapatan dari target sebesar Rp.78.321.210,00 atau 39,16%. Bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, maka terlihat kontribusi Penerimaan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terhadap keseluruhan penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah mencapai 0,59%.

(5) Penerimaan Ganti Rugi atas Kerugian/Kehilangan Kekayaan Daerah (TP-TGR)

Realisasi Penerimaan TP-TGR Pendapatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 tidak berhasil mencapai target yaitu terealisasi sebesar Rp.293.748.369,81 atau 49,45% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.594.000.000,00 Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara keseluruhan, maka kontribusi pendapatan Penerimaan TP-TGR terhadap lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mencapai 2,22%.

(6) Sumbangan dari Pihak Ketiga

Realisasi penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai sebesar Rp.2.518.481.300,00 atau 122,28% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.060.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 penerimaan ini berhasil melampaui target sebesar Rp.458.081.300,00 atau 22,28%. Realisasi pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga diperoleh dari :

- (a) Sumbangan dari Dealer Kendaraan Bermotor
- (b) Sumbangan dari PT. Jasa Raharja
- (c) Sumbangan dari mutasi Kendaraan Bermotor Keluar Provinsi.
- (d) Pendapatan lainnya, untuk pendapatan lainnya yang tidak memiliki rekening.

Realisasi pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga lebih rinci pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2009 digambarkan pada Tabel 9

Tabel 9  
Realisasi pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga  
pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006

☒ Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah/ (Berkurang)	%
	Anggaran	Realisasi		
1. Sumbangan Dealer dari Kendaraan Bermotor	1.900.000.000,00	2.374.700.900,00	474.700.900,00	124,98
2. Sumbangan dari PT. Jasa Raharja	110.000.000,00	115.255.400,00	5.255.400,00	104,78
3. Sumbangan dari Mutasi Kendaraan Bermotor Keluar Provinsi	50.000.000,00	28.525.000,00	(21.475.000,00)	57,05
4. Pendapatan Lainnya	25.000.000,00	25.100.000,00	100.000,00	100,40
Jumlah	2.085.000.000,00	2.543.581.300,00	458.581.300,00	121,99

## 2) BAGIAN DANA PERIMBANGAN

Bagian Dana Perimbangan ini adalah perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab. Sebagaimana diketahui bahwa Dana Perimbangan merupakan Pendapatan Negara yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendapatan Daerah dari Bagian Dana Perimbangan ini bersumber dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi (termasuk PPh Pasal 21), Sumber daya Alam yang terdiri dari peran Hak Penguasa Hutan, Provisi Sumber daya Hutan, Iuran Tetap/Landrent dan Royalti. Selain pendapatan tersebut diatas, juga Daerah mendapat Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum, dimana pengaturan yang lebih teknis ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.

Realisasi pendapatan Bagian Provinsi Kalimantan Tengah atas Dana Perimbangan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai sebesar Rp.673.708.294.385,00 atau 105,72% dari target ditetapkan sebesar Rp.673.250.000.000,00.

Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 realisasi pendapatannya melampaui target sebesar Rp.36.458.294.385,00 atau 5,72%.

Apabila realisasi pendapatan Dana Perimbangan ini dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah yang jumlahnya mencapai Rp.215.664.731.147,91,00 maka kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah mencapai 32,01% Realisasi pendapatan Dana Perimbangan tersebut bersumber dari :

- a) Bagi Hasil Pajak realisasinya mencapai sebesar Rp.88.646.309.396,00 atau 138,51%.
- b) Bagi hasil Bukan Pajak realisasinya mencapai sebesar Rp.33.061.984.989,06,00 atau 155,59%.
- c) Dana Alokasi Umum realisasinya mencapai Rp.552.000.000.000,00 atau 100%.

Realisasi pendapatan Dana Perimbangan pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 digambarkan pada Tabel 10.

Tabel 10  
Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan  
pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006

Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah/ (Berkurang)	%
	Anggaran	Realisasi		
1. Bagi Hasil Pajak :	64.000.000.000,00	88.647.715.932,00	24.647.715.932,00	138,51
- Pajak Bumi dan Bangunan	53.500.000.000,00	80.009.543.467,00	26.509.543.467,00	149,55
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.300.000.000,00	1.770.549.918,00	(1.529.450.082,00)	53,65
- Pajak Penghasilan Orang Pribadi	7.200.000.000,00	6.867.622.547,00	(332.377.453,00)	95,38
2. Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam :	21.250.000.000,00	33.061.984.989,00	11.811.984.989,00	155,59
- Iuran Hak Penguasaan Hutan	1.000.000.000,00	963.444.000,00	(36.556.000,00)	96,34
- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	17.000.000.000,00	26.404.544.766,00	9.404.544.766,00	155,32
- Iuran Tetap/Landrent	750.000.000,00	1.212.323.414,00	462.323.414,00	161,64
- Iuran Eksploitasi (Royalti)	2.500.000.000,00	4.481.672.809,00	1.981.672.809,00	179,27
3. Dana Alokasi Umum	552.000.000.000,00	552.000.000.000,00	-	100,00
Jumlah	637.250.000.000,00	673.709.700.921,00	36.459.700.921,00	105,72

Penjelasan lebih lanjut realisasi pendapatan Bagian Dana Perimbangan, pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

**a) Bagi Hasil Pajak :**

Realisasi pendapatan Bagi Hasil Pajak sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp.88.646.309.396,00 atau 138,51% dari target yang ditetapkan Rp.64.000.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 terjadi penerimaan ini berhasil melampaui target sebesar Rp.24.646.309.396,00 atau 38,51%.

Bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan Dana Perimbangan, maka kontribusi terhadap Dana Perimbangan cukup signifikan yaitu mencapai 16,95%. Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak terdiri dari :

(1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Bagian Daerah dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 realisasinya mencapai sebesar Rp.80.009.543.467,00 atau 149,55% dari target yang ditetapkan Rp.53.500.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 ini penerimaan PBB berhasil melampaui target sebesar Rp.26.509.543.467,00 atau 49,55%.

Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak secara keseluruhan, maka terlihat kontribusi PBB terhadap Bagi Hasil Pajak sangat signifikan yaitu mencapai 65,73%.

Berhasilnya upaya pencapaian target realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikarenakan adanya upaya, antara lain:

- (a) Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait.
- (b) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
- (c) Adanya upaya pemutakhiran data objek dan subjek PBB yang berkelanjutan.
- (d) Peningkatan sistem pelayanan pembayaran melalui "payment on line system" di beberapa bank, sebagai tempat pembayaran PBB.
- (e) Pemberian hadiah dan penghargaan kepada RT/RW yang berprestasi dalam membantu pelaksanaan pemungutan PBB.

(2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bagian Daerah dari pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 realisasinya mencapai Rp.1.770.549.918,00 atau 53,65% dari target yang ditetapkan Rp.3.300.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 ini realisasi penerimaan BPHTB

berkurang dari target sebesar Rp.1.529.450.082,00 atau 46,35%.

Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak secara keseluruhan, maka kontribusi BPHTB terhadap Bagi Hasil Pajak tidak mencapai target.

(3) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH Pasal 21)

Pendapatan Negara dari Pajak Penghasilan Perorangan (PPH) ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Adapun yang menjadi bagian Daerah dari pendapatan PPh diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000, pendapatan PPh ini dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbalan 20% untuk Daerah dan 80% untuk Pemerintah Pusat.

Bagian Daerah Provinsi Kalimantan tengah dari pendapatan PPh realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar Rp.6.867.622.547,00 atau 95,38% dari target yang ditetapkan Rp.7.200.000.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan Bagi Hasil Pajak secara keseluruhan, maka kontribusi PPh Pasal 21 terhadap Bagi Hasil Pajak jumlahnya mencapai 5,64%.

Walaupun PPh ini merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat, namun tetap diupayakan peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan PPh, serta koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat.

**b) Bagi Hasil Bukan Pajak :**

Realisasi penerimaan Pos Bagi Hasil Bukan Pajak sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai sebesar Rp.33.061.984.989,00 atau 155,59% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.21.250.000.000,00

Dengan demikian realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak berhasil melampaui target sebesar Rp.11.811.984.989,00 atau 155,59% dari target yang ditetapkan.

Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana perimbangan secara keseluruhan, maka kontribusi Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Dana perimbangan mencapai 55,59%.

**c) Dana Alokasi Umum :**

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp.552.000.000.000,00 atau 100 % dari target yang ditetapkan Rp.552.000.000.000,00. Dengan demikian maka pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 realisasi pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum mencapai 100%.

**d) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :**

Realisasi pendapatan Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 tidak dianggarkan.

**b. BELANJA DAERAH MENURUT STRUKTUR TERDIRI DARI****1. Belanja Daerah Menurut Bagian Belanja**

Belanja Daerah menurut Bagian terdiri dari Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik. Belanja Aparatur Daerah adalah bagian belanja yang terdiri Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan dan Belanja Modal Aparatur yang dialokasikan pada atau digunakan untuk

membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat.

Belanja Pelayanan Publik adalah bagian belanja terdiri dari Belanja Administrasi Umum, Belanja operasi dan pemeliharaan, belanja Modal, Belanja Bantuan Keuangan dan belanja tidak tersangka yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (public).

Realisasi Belanja Daerah menurut Bagian Belanja secara garis besarnya sebagai berikut :

a) Belanja Aparatur

Bagian Belanja Aparatur pada tahun Anggaran 2006, anggarannya dialokasikan sebesar Rp.328.455.621.775,00 atau 36,34% dari total belanja Daerah. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp.296.344.662.883,83 atau 90,22% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.32.110.958.891,17

b) Belanja Pelayanan Publik

Bagian Belanja Pelayanan Publik pada tahun Anggaran 2006, anggarannya dialokasikan sebesar Rp.575.326.378.226,00 atau 63,66% dari total belanja Daerah. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp.544.168.534.089,69 atau 94,58% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.31.157.844.136,31

## **2. Belanja Daerah menurut Kelompok dan Jenis Belanja**

Realisasi Belanja Daerah menurut Kelompok dan Jenis nampak seperti pada Tabel 11

**Tabel 11**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja daerah menurut**  
**Kelompok dan Jenis Belanja**

No Urt	Pos Belanja/ Unit Kerja	Jumlah Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Berlebih/ (Berkurang)	(%)
	BELANJA				
1.	BELANJA APARATUR	328.455.621.775,00	296.344.662.883,83	( 32.110.958.891,17 )	90,22
	I. Belanja ADUM	<u>225.073.939.449,00</u>	<u>203.827.688.899,83</u>	( <u>21.246.250.549,17</u> )	<u>90,56</u>
	- Belanja Peg/Personalia	148.929.905.347,00	139.597.612.956,00	( 9.332.292.391,00 )	93,73
	- Belanja Barang & Jasa	41.136.381.789,00	35.068.057.001,89	( 6.068.324.787,11 )	85,25
	- Belanja Perj. Dinas	20.750.717.000,00	17.246.337.100,00	( 3.504.379.900,00 )	83,11
	- Belanja Pemeliharaan	14.256.935.313,00	11.915.681.841,94	( 2.341.253.471,06 )	83,58
	II. Belanja OP	<u>57.098.251.403,00</u>	<u>47.474.949.470,00</u>	( <u>9.623.301.933,00</u> )	<u>83,15</u>
	- Belanja Peg/Personalia	8.801.396.150,00	7.844.317.922,00	( 957.078.228,00 )	89,13
	- Belanja Barang & Jasa	30.428.670.843,00	25.091.006.938,00	( 5.337.663.905,00 )	82,46
	- Belanja Perj. Dinas	17.587.849.500,00	14.296.825.450,00	( 3.291.024.050,00 )	81,29
	- Belanja Pemeliharaan	280.334.910,00	242.799.160,00	( 37.535.750,00 )	86,61
	III. Belanja Modal	<u>46.283.430.923,00</u>	<u>45.042.024.514,00</u>	( <u>1.241.406.409,00</u> )	<u>97,32</u>
2.	BELANJA PUBLIK	575.326.378.226,00	544.168.534.089,69	( 31.157.844.136,31 )	94,58
	I. Belanja ADUM	<u>16.631.445.260,00</u>	<u>15.843.175.787,00</u>	( <u>788.269.473,00</u> )	<u>95,26</u>
	- Belanja Peg/Personalia	-	-	-	-
	- Belanja Barang & Jasa	15.254.833.500,00	14.899.767.514,00	( 355.065.986,00 )	97,67
	- Belanja Perj. Dinas	321.350.000,00	180.673.000,00	( 140.677.000,00 )	56,22
	- Belanja Pemeliharaan	1.055.261.760,00	762.735.273,00	( 292.526.487,00 )	72,28
	II. Belanja OP	<u>69.178.664.371,00</u>	<u>65.015.361.058,00</u>	( <u>4.163.303.313,00</u> )	<u>93,98</u>
	- Belanja Peg/Personalia	4.685.991.800,00	4.388.621.050,00	( 297.370.750,00 )	93,65
	- Belanja Barang & Jasa	42.998.146.859,00	40.524.843.408,00	( 2.473.303.451,00 )	94,25
	- Belanja Perj. Dinas	10.924.129.225,00	9.883.332.200,00	( 1.040.797.025,00 )	90,47
	- Belanja Pemeliharaan	10.570.396.487,00	10.218.564.400,00	( 351.832.087,00 )	96,67
	III. Belanja Modal	<u>340.296.097.342,00</u>	<u>337.574.121.601,69</u>	( <u>2.721.975.740,31</u> )	<u>99,20</u>
	IV. Belanja Bagi Hasil	<u>84.753.175.000,00</u>	<u>75.719.308.665,00</u>	( <u>9.033.866.335,00</u> )	<u>89,34</u>
	V. Belanja Bantuan Keu	<u>51.842.261.410,00</u>	<u>47.811.849.728,00</u>	( <u>4.030.411.682,00</u> )	<u>92,23</u>
	VI. Belanja Tidak Tersangka	<u>12.624.734.843,00</u>	<u>2.204.717.250,00</u>	( <u>10.420.017.593,00</u> )	<u>17,46</u>
	JUMLAH	903.782.000.001,00	840.513.196.973,52	( 63.268.803.027,48 )	93,00

Dari data tersebut diatas terlihat Belanja daerah menurut Kelompok dan Jenis Belanja sebagai berikut :

#### I. BELANJA APARATUR

##### a) Belanja Administrasi Umum

Pada tahun Anggaran 2006 Belanja Administrasi Umum, dialokasikan sebesar Rp.225.073.939.449,00 atau 24,90% dari total belanja Daerah. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp.203.827.688.899,83 atau 22,55%, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.21.246.250.549,17

- (1) Belanja Pegawai dalam kelompok Administrasi Umum dianggarkan sebesar Rp.148.929.905.347,00 atau 66,16% dari total kelompok Belanja Administrasi Umum. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp.139.597.612.956,00 atau 62,02% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.9.332.292.391,00
  - (2) Belanja Barang dan Jasa dalam kelompok Administrasi Umum dianggarkan sebesar Rp.41.136.381.789,00 atau 18,27% dari total kelompok Belanja Administrasi Umum. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp.35.068.057.001,89 atau 15,58% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.6.068.324.787,11
  - (3) Belanja Perjalanan Dinas dalam kelompok Administrasi Umum dianggarkan sebesar Rp.20.750.717.000,00 atau 9,21% dari total kelompok Belanja Administrasi Umum. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp.17.246.337.100,00 atau 7,66% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.3.504.379.900,00
  - (4) Belanja Pemeliharaan dalam kelompok Administrasi Umum dianggarkan sebesar Rp.14.256.935.313,00 atau 6,33% dari total Belanja Daerah. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp.11.915.681.841,94 atau 5,29% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.2.341.253.471,06
- b) Belanja Operasi dan Pemeliharaan
- Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan dialokasikan sebesar Rp.57.098.251.403,00 atau 6,31% dari total Belanja Daerah. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp.47.474.949.470,00 atau 5,25% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.9.623.301.933,00
- (1) Belanja Pegawai dalam kelompok Administrasi Umum dianggarkan sebesar Rp.8.801.396.150,00 atau 15,41% dari total kelompok Belanja Operasional dan Pemeliharaan. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp.7.884.317.922,00 atau 13,80%

sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.957.078.228,00

- (2) Belanja Barang dan Jasa dalam kelompok Belanja Operasional dan Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp.30.428.670.843,00 atau 53,29% dari total kelompok Belanja Administrasi Umum. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp.25.091.006.938,00 atau 43,94% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.5.337.663.905,00
- (3) Belanja Perjalanan Dinas dalam kelompok Belanja Operasional dan Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp.17.587.849.500,00 atau 30,80% dari total kelompok Belanja Operasional dan Pemeliharaan. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp.14.296.825.450,00 atau 25,03% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.3.291.024.050,-
- (4) Belanja Pemeliharaan dalam kelompok Belanja Operasional dan Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp.280.334.910,00 atau 0,49% dari total kelompok Belanja Operasional dan Pemeliharaan. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp.242.799.160,00 atau 0,42% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.37.535.750,00

c) Belanja Modal

Kelompok Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp.46.283.430.923,00 atau 5,12% dari total Belanja Daerah. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp.45.042.024.514,00 atau 4,98% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.241.406.409,00

## II. BELANJA PELAYANAN PUBLIK

a) Belanja Administrasi Umum

Pada tahun anggaran 2006, Belanja Administrasi Umum Publik dialokasikan sebesar Rp.16.631.445.200,00 atau 1,84% dari total belanja Daerah. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp.15.843.175.785,00 atau 1,75% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.788.269.473,00

- 1) Belanja Pegawai dalam kelompok Administrasi Umum Publik tidak dianggarkan.
  - 2) Belanja Barang dan Jasa dalam kelompok Administrasi Umum Publik dianggarkan sebesar Rp.15.254.833.500,00 atau 91,72% dari total kelompok Belanja Administrasi Umum Publik. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp.14.899.767.514,00 atau 89,58% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.788.269.473,00
  - 3) Belanja Perjalanan Dinas dalam kelompok Administrasi Umum Publik dianggarkan sebesar Rp.321.350.000,00 atau 1,93% dari total kelompok Belanja Administrasi Umum Publik. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp.180.673.000,00 atau 1,08% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.140.677.000,00
  - 4) Belanja Pemeliharaan dalam kelompok Administrasi Umum Publik dianggarkan sebesar Rp.1.055.261.760,00 atau 6,34% dari total kelompok Belanja Administrasi Umum Publik. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp.762.735.273,00 atau 4,58%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.292.526.487,00
- b) Belanja Operasi dan Pemeliharaan
- Pada tahun anggaran 2006, Belanja Administrasi Umum Publik dialokasikan sebesar Rp.69.178.664.371,00 atau 7,65% dari total belanja Daerah. Sampai akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp.65.015.361.058,00 atau 7,19% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.4.163.303.313,00
- 1) Belanja Pegawai dalam kelompok belanja operasional dan pemeliharaan Publik yang dianggarkan sebesar Rp.4.685.991.800,00 atau 6,77% dari total kelompok belanja Operasional dan pemeliharaan Publik, Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp.4.388.621.050,00 atau 6,34%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.297.370.750,00
  - (2) Belanja Barang dan Jasa dalam kelompok belanja operasional dan pemeliharaan Publik dianggarkan

sebesar Rp.42.998.146.859,00 atau 62,15% dari total belanja operasional dan pemeliharaan Publik. Sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.40.524.843.408,00 atau 58,57% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.2.473.303.451,00

(3) Belanja Perjalanan Dinas dalam kelompok belanja operasional dan pemeliharaan Publik dianggarkan sebesar Rp.10.924.129.225,00 atau 15,79% dari total belanja operasional dan pemeliharaan Publik. Sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.9.883.332.200,00 atau 14,28% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.040.797.025,00

(4) Belanja Pemeliharaan dalam kelompok belanja operasional dan pemeliharaan Publik dianggarkan sebesar Rp.10.570.396.487,00 atau 15,27% dari total belanja operasional dan pemeliharaan Publik. Sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.10.218.564.400,00 atau 14,77% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.352.832.087,00

c) Belanja Modal

Kelompok Belanja Modal dalam kelompok belanja Modal Publik dialokasikan sebesar Rp.340.296.097.342,00 atau 37,65% dari total belanja Daerah. Sampai akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp.337.574.121.601,69,00 atau 37,35% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.2.721.975.740,31,00

d) Belanja Bagi Hasil

Kelompok Belanja Bagi hasil dalam kelompok belanja bagi hasil Publik dialokasikan sebesar Rp.84.753.175.000,00 atau 9,37% dari total belanja Daerah. Sampai akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp.75.719.308.665,00 atau 8,37% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.9.033.866.335,00

e) Belanja Bantuan Keuangan

Kelompok belanja bantuan keuangan dalam kelompok bantuan keuangan Publik dialokasikan sebesar Rp.51.842.261.410,00 atau 5,73% sehingga terdapat sisa

anggaran sebesar Rp.47.811.849.728,00 atau 5,29% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.4.030.411.682,00

f) Belanja Tidak Tersangka

Belanja ini dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana social atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Belanja Tidak Tersangka juga dianggarkan untuk pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, antara lain pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Dalam kelompok belanja tidak tersangka Publik dialokasikan sebesar Rp.12.624.734.843,- atau 1,39% dari total belanja Daerah. Sampai akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp.2.204.717.250,00 atau 0,24% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.10.420.017.593,00.

**c. REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH**

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, bahwa pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pembiayaan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam struktur APBD, komponennya terdiri dari sumber Penerimaan Daerah yang meliputi sisa lebih Perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transper dari dana cadangan dan hasil penjualan asset Daerah yang dipisahkan. Sedangkan sumber pengeluaran Daerah meliputi pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, transper ke dana cadangan, penyertaan modal dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Dalam perhitungan APBD tahun anggaran 2006, realisasi pembiayaan Daerah yang bersumber dari penerimaan Daerah adalah sebesar Rp.104.313.602.402,55,00 sedangkan yang bersumber dari pengeluaran Daerah sebesar Rp.153.259.928.372,00 penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi sumber pembiayaan adalah sebagai berikut :

a. Sumber Penerimaan Daerah

Dalam Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 realisasi sumber Penerimaan Daerah hanya diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu sebesar Rp.93.808.129.605,55

b. Sumber Pengeluaran Daerah

Untuk sasaran pengeluaran yang terjadi pada pembiayaan, pada perhitungan APBD tahun anggaran 2006, realisasinya sebesar Rp.106.728.530.638,55,-

Adapun realisasi pengeluaran tersebut terdiri :

1). Transfer ke Dana Cadangan	Rp.	8.000.000.000,00
2). Penyertaan Modal	Rp.	8.000.000.000,00
3). Pembayaran Hutang Pokok Yang Jatuh Tempo	Rp.	--
4). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	126.754.455.575,00

### 3.2.PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### Permasalahan

Membesar dan menguatnya peran PAD dalam struktur penerimaan daerah akan semakin mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan rumah tangganya sesuai misi yang diemban Otonomi Daerah dalam UU Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun upaya penguatan peran PAD tersebut membutuhkan suatu perencanaan startegis jangka pendek, menengah dan panjang yang sistimatis dan terprogram serta melibatkan segenap instansi terkait, mengingat pada saat ini kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah masih sangat kecil, yaitu rata-rata masih berada di bawah 30 %.

Kondisi demikian disebabkan faktor-faktor yang dapat diidentifikasi sebagai permasalahan sebagaimana telah pada tabel berikut ini :

- a. Masih perlu ditingkatkan koordinasi antar instansi terkait dengan pemungutan PAD maupun antar tingkatan Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Sumber daya manusia kuantitatif masih diperlukan untuk mengisi formasi pada UPPD khususnya UPPD yang baru terbentuk. Secara kualitatif, SDM perlu diarahkan agar semakin mendekati kompetensinya sebagai aparat yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendapatan daerah, terutama dalam hal kemampuan memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
- c. Dasar hukum pemungutan banyak yang sudah memerlukan penyesuaian-penyusaian dengan berbagai ketentuan/ peraturan baru yang ada.
- d. Kesadaran wajib pajak perlu terus ditingkatkan dan perlu ditanamkan kesadaran bahwa dengan melakukan pembayaran pajak maupun pungutan lainnya maka masyarakat secara langsung turut serta dalam pembangunan daerahnya.
- e. Masih perlu penataan secara terus menerus yang terkait dengan sistem administrasi, mekanisme, prosedur perpajakan/pungutan daerah yang telah mengakomodir berbagai ketentuan baru yang berlaku.
- f. Data potensi riil pajak/retribusi daerah yang ada masih perlu ditingkatkan kualitasnya melalui mekanisme lain yang lebih tepat.
- g. Komputerisasi SAMSAT perlu dilengkapi pada Kantor UPPD/SAMSAT yang masih memberikan pelayanannya secara manual.
- h. Penyaluran dana perimbangan masih kurang tepat waktu terutama yang terkait dengan bagi hasil sumber daya alam, demikian pula kepastian jumlah yang akan diterima daerah seringkali tidak sesuai dengan perhitungan daerah.

### Solusi

Upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Kordinasi perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pelaksanaan koordinasi ini memerlukan anggaran khusus agar hasilnya dapat maksimal misalnya melalui razia kendaraan bermotor secara terpadu, rapat-rapat kordinasi secara intensif dan berkelanjutan, melakukan tinjauan lapangan kepada obyek-obyek tertentu seperti perusahaan-perusahaan yang lokasinya terpencil, dll.
- Perekrutan tenaga-tenaga baru yang memiliki kompetensi dan bersedia ditempatkan di daerah Kabupaten, juga mendidik dan melatih aparat yang sudah ada agar dapat lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya terutama yang terkait dengan pelayanan publik.
- Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk bersama-sama melakukan program legalitas untuk penyesuaian berbagai peraturan di Bidang Pendapatan yang sudah tidak relevan dan perlu penyesuaian tarif, demikian pula halnya dengan sistem administrasi/mekanisme pemungutan yang perlu dipayungi oleh dasar hukum yang sesuai agar dapat meminimalisir kebocoran baik keuangan maupun materil.
- Perlu kerja sama dengan Instansi terkait untuk melakukan rekonsiliasi data potensi riil pajak dan pungutan lainnya, mislanya bekerja sama dengan BPS dalam kegiatan sensus.
- Alokasi dana yang berkelanjutan untuk mengadakan Sistem Komputerisasi SAMSAT yang mapan dan terpilihara dengan baik.
- Melakukan koordinasi yang semakin intens dengan Pemerintah Pusat untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat mengenai dana bagi hasil yang sesuai dengan potensi riil daerah.

### **3.3.PENGELOLAAN BELANJA DAERAH**

Dalam penyusunan APBD 2006 belanja daerah dikelompokkan menurut struktur program (bidang dan program) dan struktur belanja (bagian, kelompok dan jenis belanja). Oleh karena itu maka dalam perhitungan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2006 menggunakan struktur yang sama.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, tanggal 4 Januari 2007 tentang Sistematika LKPJ, realisasi daerah disusun sebagai berikut :

## **1. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai suatu rencana keuangan tahunan Daerah, telah diupayakan penyusunannya secara cermat dan menyeluruh, yang disesuaikan dengan perkiraan kemampuan dana yang dapat dihimpun untuk membiayai rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 ini tetap mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

### **1. Partisipasi Masyarakat**

Hal ini mengandung makna, bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

### **2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.**

Harus dapat menyajikan informasi yang jelas secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan setiap jenis/objek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

### **3. Disiplin Anggaran**

Beberapa prinsip dasar dalam disiplin anggaran yang perlu diperhitungkan antara lain :

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang di anggarkan pada setiap

program dan kegiatan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

- b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

#### 4. Keadilan Anggaran

Pajak Daerah, restribusi Daerah dan pungutan Daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus dipertimbangkan kemampuan untuk membayar.

Masyarakat yang memiliki kemampuan pendapatan rendah secara proporsional diberi beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula berimbang dengan penghasilannya. Kebijakan tersebut, Pemerintah dapat melakukan tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan.

Selain itu dalam mengalokasikan belanja Daerah harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

#### 5. Efisien dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisien dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan :

- Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai.

- Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja serta penetapan harga satuan yang rasional.

## 2. TARGET DAN REALISASI BELANJA

Pengelompokan struktur program terbagi kedalam 18 bidang yang terdiri dari 161 program. Setiap program akan ditangani oleh satu atau beberapa unit kerja, sehingga dalam mengukur indikator kinerja unit kerja yang bersangkutan akan lebih mudah dilaksanakan. Untuk melihat anggaran dan realisasi ke 18 bidang tersebut dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12  
Realisasi Belanja Daerah menurut Bidang  
Tahun Anggaran 2006

No.	Bidang	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
01.	Bidang Administrasi Umum Pemerintahan	348.009.759.898,00	305.068.093.437,00	87,66
02.	Bidang Pertanian	23.174.158.326,00	20.591.091.504,00	88,85
03.	Bidang Perikanan dan Kelautan	7.939.557.605,00	7.123.577.997,00	89,72
04.	Bidang Pertambangan dan Energi	4.661.249.753,00	4.368.980.778,00	93,73
05.	Bidang Kehutanan dan Perkebunan	25.035.062.109,00	22.434.991.432,00	89,61
06.	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	8.793.769.170,00	8.297.279.007,00	94,35
07.	Bidang Perkoperasian	4.542.301.260,00	4.318.104.461,00	95,06
08.	Bidang Penanaman Modal	5.893.815.445,00	5.435.900.532,00	92,23
09.	Bidang Ketenagakerjaan	6.167.459.782,00	5.876.196.141,00	95,28
10.	Bidang Kesehatan	74.580.091.262,00	69.175.098.546,00	92,75
11.	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	57.044.943.342,00	55.872.561.607,58	97,94
12.	Bidang Sosial	9.572.661.712,00	8.726.594.500,00	91,16
13.	Bidang Pekerjaan Umum	279.578.110.965,00	276.539.734.160,00	98,91
14.	Bidang Perhubungan	21.737.155.191,00	21.267.736.565,00	97,84
15.	Bidang Lingkungan Hidup	4.495.814.998,00	4.289.736.362,00	95,42
16.	Bidang Kependudukan	7.488.551.506,00	6.971.145.516,94	93,09
17.	Bidang Olah Raga	8.732.105.927,00	8.520.552.577,00	97,58
18.	Bidang Kepariwisata	6.335.431.750,00	5.635.821.850,00	88,96
	Jumlah	903.782.000.001,00	840.513.196.973,52	93,00

### 1) Bidang Administrasi Umum Pemerintahan

Pada tahun anggaran 2006 bidang ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.348.009.759.898,00 atau 38,50% dari total Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran secara keseluruhan, anggaran pada bidang ini telah terealisasi sebesar Rp.305.068.093.437,00 atau 33,75% dengan demikian pada bidang ini masih terdapat sisa sebesar Rp.42.941.666.461,00

Pada bidang ini program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Program Bantuan Kehidupan Beragama di Kalimantan Tengah dimaksudkan untuk adanya keterpaduan kegiatan pembinaan keagamaan di Kalimantan Tengah.

Pada tahun anggaran 2006 program ini melaksanakan 6 kegiatan yaitu :

- ❖ Bantuan untuk agama Islam dan urusan Haji
- ❖ Bantuan untuk agama Kristen Protestan
- ❖ Bantuan untuk agama Hindu Kaharingan
- ❖ Bantuan untuk agama Budha
- ❖ Bantuan untuk agama Hindu Dharma

Hasil yang telah dicapai pada program ini adalah meningkatnya pemahaman antar pemeluk agama. Program ini seluruhnya telah mencapai 100%.

- Program Bantuan Keuangan untuk Pendidikan pada bagian Bantuan tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Bantuan untuk Pendidikan Pontren dan MIS
- Bantuan untuk STT GKE
- Bantuan untuk SMK GKE Mandomai

Hasil yang telah dicapai pada bagian ini adalah meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan.

- Program Bantuan Keuangan untuk kegiatan Keagamaan.

Pada program bantuan tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- MTQ (Nasional dan Provinsi)

- Pesarawi (Nasional)
- Kongres Nasional Mahasaba di Bali
- Seleksi Kitab Suci Tripitaka Nasional
- Festival Tandak Tahun 2006 Provinsi
- Mamapas Lewu

Hasil yang telah dicapai pada program ini adalah peningkatan pemahaman beragama.

- Program Bantuan Keuangan kepada Organisasi Keolahragaan dan Kesenian. Pada program bantuan tahun anggaran ini dilaksanakan untuk kegiatan KONI

Hasil yang dicapai program bantuan keuangan untuk Penunjang Operasional KONI.

- Program Bantuan keuangan kepada organisasi Kepemudaan. Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Bantuan untuk Pramuka dan Generasi Muda
- Bantuan untuk Karang Taruna

Hasil dicapai program ini adalah terbina Generasi Muda dan Karang Taruna.

- Program Bantuan Keuangan kepada Organisasi Profesi. Pada Tahun Anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- KORPRI
- PKK
- Dharma Wanita
- KADIN
- PWRI
- DHD-45

Hasil telah dicapai pada program ini seluruhnya telah mencapai 100%.

- Program Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan oleh Partai Politik untuk menunjang operasional Partai.
- Program Bantuan Keuangan kepada Instansi dan atau Organisasi. Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - Bantuan untuk Perguruan Tinggi
  - Bantuan untuk RRI, TVRI.
  - Bantuan untuk KPU
  - Bantuan untuk KAPET DAS KAKAB
  - Bantuan untuk kegiatan Muspida
  - Bantuan untuk Koordinasi Keluarga Berencana

Hasil yang telah dicapai program ini terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat.
- Program Bantuan Keuangan kepada Organisasi Sosial. Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - yayasan Yatim Piatu
  - Yayasan Cacat veteran/organisasi penyandang cacat.
  - BK3S
  - PMI
  - Yayasan Pendidikan SLB.
  - PPTI
  - Satkorlak Penanggulangan Bencana
  - Lembaga Joint Adulam Ministry (Pembangunan Gedung Asrama Pria penderita Penyakit Jiwa).
- Program Bantuan Keuangan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan perbantuan sebagai berikut :
  - MAD-KT + Tim Peneliti Hukum Adat Dayak
  - Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat Kalteng
  - PERWARI Provinsi Kalteng
  - BKOW
  - Bantuan Keuangan untuk kemasyarakatan

- Jaringan Perempuan dan Politik
- Yayasan Galilea
- Organisasi Masyarakat (Narkoba)
- Program Bantuan keuangan kepada pemerintah Desa/kelurahan. Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - Bantuan kepada Desa/kelurahan
  - Bantuan dari penyisihan Pajak Daerah dan PBB Bagian provinsi
  - Bantuan dari penyisihan PBB bagian Provinsi
- Program Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan perbantuan untuk pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di Kabupaten/Kota
- Program Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - Peningkatan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah (Biro Organisasi)
  - Pencanaan kelembagaan Kepemerintahan yang baik (Biro Organisasi)
  - Peningkatan SDM (Bintek laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Biro Organisasi)
  - Peningkatan SDM (Bintek Analisis Jabatan) Biro Organisasi
  - Peningkatan pelaksanaan pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah (Biro Organisasi)
  - Pembudayaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Biro Organisasi)
  - Pengelolaan Administrasi LHKPN (Biro Organisasi)
  - Analisa jabatan (Biro Organisasi)
  - Peningkatan SDM (Bintek Organisasi dan Metoda) Biro Organisasi)

Hasil yang telah dicapai program-program tersebut antara lain adalah pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi lebih efektif dan efisien.

- Program Peningkatan kerjasama antar Pemerintah. Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- melakukan inventarisasi dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (Biro Tapra)
  - Pendataan desa dan demang se Kalteng (Biro Tapra)
  - Koordinasi/Pembinaan dan evaluasi pemerintah desa di kalteng (Biro Tapra)
  - Pembekalan Kepala Desa dan BPD (Biro Tapra)
  - Melakukan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan ke Pusat dan Daerah dalam rangka koordinasi pelaksanaan Pilkada Barsel (Biro Tapra)
  - Pengadaan alat operasionalisasi pemerintah Desa (Sub bag Pendataan) Biro Tapra
  - Pengadaan alat operasional kegiatan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (Sub Bag Inventaris dan Evaluasi) Biro Tapra
  - Melakukan pengumpulan data penyelenggaraan urusan desentralisasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota (biro Tapra)
  - Penyusunan Perda pembagian urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/Kota (Sub Bag Koordinasi) Biro Tapra
  - Ganti Rugi Tanah disekitar jembatan kahayan (Biro Tapra)
  - Penyelenggaraan anggaran penyusunan LKPJ Gubernur Kalteng dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Biro Tapra)
  - Peningkatan Intensitas Koordinasi dengan DPRD dan lembaga terkait (Biro Tapra)
  - Penyediaan bahan materi Raker Bupati/Walikota (Biro Tapra)
  - Melaksanakan pembekalan dan studi banding kepala desa/lurah, demang ke daerah yang lebih maju (Biro Tapra)

- Program pengelolaan Sumber daya manusia Aparatur. Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - Peningkatan Sumber Daya manusia Aparatur pada Biro Bina pemberdayaan perekonomian (Biro Ekonomi)
  - Peningkatan pelayanan keprotokolan Pemda Provinsi Kalteng (Biro Umum)
  - Program Pisah Sambut Tahun Baru 2006/2007 (Biro Umum)
  - Study Banding pendirian dan pelaksanaan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (Biro Perekonomian)
  - Pengembangan SIMPEREKDA (Biro perekonomian)
  - Bintek keprotokolan dan telekomunikasi pada kab/Kota (Biro Umum)
  - Evaluasi pelaksanaan tugas bidang keprotokolan dan telekomunikasi pada kab/Kota (Biro Umum)
  - Diklat Lokakarya, Workshop di bidang keprotokolan, sandi dan telekomunikasi, kearsipan, TUK, perencanaan, kepegawaian, promosi daerah (Biro Umum)
  
- Program peningkatan kualitas Pelayanan Publik. Pada tahun anggran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - Fasilitasi liputan media cetak, elektronik dan penunjang operasional kehumasan (Biro Humas)
  - Fasilitasi Pertemuan Pers Gubernur/Wakil Gubernur dan pejabat lainnya (Biro Humas)
  - Perjalanan jurnalistik Pers dan Humas serta mengikuti kunjungan kerja Gubernur/Wakil Gubernur dan Konsultasi kehumasan (Biro Humas)
  - Pengadaan Peralatan (Penerbitan Warta Bulanan Isen Mulang) dan penunjang Operasional kehumasan (Biro Humas)
  - Pencetakan Warta Bulanan (Penerbitan Warta Bulanan Isen Mulang (Biro Humas)
  - Penerbitan Warta Bergambar (Biro Humas)
  - Penerbitan/Pencetakan Booklat (Biro Humas)

- Mencetak foto Gubernur/Wakil Gubernur Kalteng 2005-2010 (Biro Humas)
- Penyusunan kajian Isue Publik Analisis Media di Kalteng (Biro Humas)
- Penyusunan Himpunan Kliping Surat Kabar (Biro Humas)
- Penunjang Operasional Band Pemda Provinsi Kalteng (Biro Humas)
- Pembuatan Profil Gubernur/Wakil Gubernur Kalteng, Rubrik Advertorial, Lipsus dan Pemuatan/penulisan Artikel pada Majalah serta Iklan layanan masyarakat (Biro Humas)
- Pembuatan Buku Foto Dokumentasi kegiatan Pemerintah Provinsi Kalteng (Biro Humas)
- Penyusunan Standarisasi Harga Satuan barang dan jasa (Biro Perlengkapan)
- Penyusunan rencana kebutuhan Barang dan RTBU (Biro perlengkapan)
- Penyusunan evaluasi Kinerja Bidang Perlengkapan (Biro perlengkapan)
- Penyusunan rencana kerja Biro Perlengkapan (Biro perlengkapan)
- Penyusunan dan sosialisasi Perda Pengelolaan Barang daerah dan Rapat Kerja Perlengkapan (Biro perlengkapan)
- Dalam rangka mengakhiri tutup tahun 2006
- Peningkatan sarana dan Prsarana Kantor (Biro Umum)
- Pengadaan kendaraan Dinas (Biro Perlengkapan)
- Pengadaan alat kantor dan rumah tangga Gubernur Kalteng (Biro Perlengkapan)
- Pengadaan Perlengkapan untuk kantor Mess pemda Kalteng di Banjarmasin (Biro Perlengkapan)
- Pengadaan perlengkapan untuk Asrama Mahasiswa kalteng di Banjar Baru dan Banjarmasin (biro Perlengkapan)
- Pengadaan Perlengkapan untuk kantor Show Window kalteng di Yogyakarta (Biro Perlengkapan)
- Rehabilitasi Kantor Gubernur dan penataan Halaman sekitarnya (Biro perlengkapan)

- Lanjutan pembangunan Gedung Laboratorium SPN Tjilik Riwut (Biro Tapra)
  - Rehab Prasarana Fisik Gedung Milik pemerintah Provinsi Kalteng dan Fasilitas penunjang lainnya (Biro perlengkapan)
  - Rehabilitasi Gedung Rks DPRD (Biro perlengkapan)
  - Pengadaan General Rumah jabatan Gubernur kalteng (Biro Perlengkapan)
  - Rehabilitasi Rumah jabatan Golongan I dan Golongan II (Biro Perlengkapan)
  - Rehabilitasi dan penataan lingkungan Rumah jabatan/Kedinasan Gubernur Kalteng (Biro Perlengkapan)
  - Rehabilitasi Mess pemda kalteng di Banjarmasin (Biro Perlengkapan)
  - Rehabilitasi Asrama mahasiswa Kalteng di Banjarmasin dan Banjar Baru
  - Pengadaan alat kantor dan rumah tangga Wakil Gubernur Kalteng (Biro Perlengkapan)
  - Pengadaan sarana dan prasarana kantor (Biro Umum)
  - Pentaan Gedung Eks kantor Show Window menjadi asrama Mahasiswa Jl. Abu Bakar Ali Yogyakarta (Biro Perlengkapan)
  - Pengadaan perlengkapan kantor dan rumah tangga Sekda Provinsi Kalteng (Biro Perlengkapan)
  - Rehabilitasi dan penataan Lingkungan Rumah jabatan Wakil Gubernur Kalteng (Biro Perlengkapan)
  - Pengadaan Perlengkapan untuk Asrama Mahasiwa kalteng di Jl. Abubakar Ali Yogyakarta (Biro perlengkapan)
  - Pengadaan peralatan kantor (Biro Organisasi)
- Program peningkatan efektivitas pengeluaran Negara
- Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Rapat koordinasi Penyusunan DASK perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 (Biro keuangan)
  - Penelitian dan penyelesaian kasus TP-TGR
  - Rapat Koordinasi penyusunan DASK APBD Tahun Anggran 2006 (Biro keuangan)

- Peningkatan pelayanan Otorisasi (Biro Keuangan)
  - Peningkatan pelayanan gaji dan tunjangan PNS daerah (Biro keuangan)
  - Peningkatan pelayanan Kas Daerah (Biro Keuangan)
  - Pengadaan Sarana dan Prsarana kantor (Biro Keuangan)
- Program Pembinaan Akuntansi keuangan Negara. Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Sosialisasi dan Bintek pemantapan Penata Usahaan keuangan berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Biro Keuangan)
  - Membangun sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen keuangan daerah (Biro keuangan)
  - Peningkatan pelayanan verifikasi dan akuntansi (Biro Keuangan)
  - Pembuatan laporan triwulan (Biro Keuangan)
  - Penyusunan konsep laporan realisasi APBD tahun anggaran 2005 (Biro keuangan)
- Program pengembangan Kelembagaan Keuangan. Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Rapat konsultasi pembahasan RASK dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 (Biro keuangan)
  - Monitoring dan Evaluasi Bantuan Dana kepada Pemerintah Desa dan kelurahan se kalteng (Biro Keuangan)
  - Rapat konsultasi pembahasan RASK APBD Tahun Anggaran 2007 (Biro Keuangan)
  - Penyusunan Peraturan Gubernur kalteng atas Hasil Evaluasi APBD oleh Menteri Dalam Negeri (Biro keuangan)
  - Penyusunan laporan konsultasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan berbasis akuntansi. (Biro Keuangan)
  - Penyusunan laporan akuntansi Barang Milik Negara (Biro Keuangan)

Hasil yang dicapai program-program antara lain tertibnya administrasi Keuangan Negara.

- Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah. Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - Inventarisasi Barang daerah (Biro perlengkapan)
  - Pengamanan aset daerah (Biro perlengkapan)
  - Sistem Informasi Pengelolaan Barang dan harta Daerah (BiroPerlengkapan)
  - Penyusunan Laporan penyerahan kegiatan selesai (Biro perlengkapan)
  - Penyusunan Realisasi pengadaan dan pemeliharaan Barang Daerah (Biro perlengkapan)
  
- Program Pemberdayaan Masyarakat. Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - Operasional Tim Monitoring dan Evaluasi PKPS-BBM Bantuan langsung (Biro perekonomian)
  - Penguatan lembaga Adat Kedemangan (Biro Tapra)
  
- Program Pengembangan Ekonomi Lokal. Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - Pokja peningkatan pemberdayaan perekonomian Daerah (Biro perekonomian)
  - Monitoring dan evaluasi Penelitian Sektor Ekonomi (Biro Perekonomian)
  - Rakor Peningkatan Pemberdayaan Perekonomian Daerah se Kalteng (Biro Perekonomian)
  - Koordinasi kegiatan pengawasan/penerbitan dan pengamatan Hutan di provinsi kalteng (Biro Perekonomian)
  - Koordinasi kegiatan pengawasan/pengendalian Harga Komoditi Perdagangan dan sembako, BBM dan Perlindungan Konsumen (Biro Perekonomian)
  - Koordinasi dan Fasilitas Pengembangan Promosi Daerah, Pameran, Festival dan Investasi (Biro Perekonomian)
  - Koordinasi dan Fasilitas Pengembangan Koperasi, UKM dan Usaha Daerah (Biro Perekonomian)
  - Koordinasi dan fasilitas pengembangan sektor kehutanan Pertambangan, perkebunan dan Pertanian, Koordinasi dan

pengembangan sektor kehutanan Pertambangan, perkebunan dan Pertanian, Perikanan di kalteng (Biro Perekonomian)

- Koordinasi dan fasilitas pengembangan Perhubungan dan lingkungan, kegiatan transmigrasi dan ketenagaakerjaan (Biro Perekonomian)
- Pembuatan data base Perijinan Sektor Ekonomi (Biro perekonomian)

Hasil yang dicapai program ini antara lain menurunnya aktivitas illegal logging di Provinsi kalteng.

- Program pembinaan Daerah. Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - Pembinaan Wilayah kabupaten pemekaran (Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten Pemekaran (Biro Tapra)
  - HUT RI dan HUT Kalteng (Biro Tapra)

Hasil yang dicapai program-program ini adalah adanya kejelasan batas administrasi pemerintah antar provinsi.

- Program penataan Ruang. Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - Penyelesaian tata batas wilayah antar Provinsi (pemasangan Tugu Batas Provinsi Kalteng dengan provinsi Kalsel (Biro Tapra)
  - Penyelesaian Tata Batas Wilayah Antar Provinsi dan kabupaten/Kota (Biro Tapra)

Hasil yang dicapai program ini adalah adanya kejelasan fiskm Tata Batas antar Provinsi dengan Provinsi dan Provinsi dengan Kabupaten/Kota

- Program pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap.
 

Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan biaya menunjang operasional BNP (Sub Bag Bantuan untuk Koordinasi Narkoba) Biro Tapra

Hasil yang dicapai program ini adalah terciptanya kesadaran Instansi terkait dalam Pemberantasan peredaran Narkoba

➤ Program perencanaan Hukum

Pada program ini dilaksanakan kegiatan peningkatan dan pengembangan JDI Hukum dan Sistem Informasi Hukum (Biro Hukum)

Hasil yang dicapai program ini adalah terlaksananya bantuan Hukum bagi Pemda

➤ Program Pembentukan Hukum

Pada program ini dilaksanakan kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Biro Hukum) dan hasil yang dicapai program ini yaitu meningkatnya institusi pemantauan yang menangani masalah HAM

➤ Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM.

Pada program ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Hukum terpadu (Biro Hukum)
- Pembentukan dan penguatan institusi RANHAM (Biro Hukum)
- Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan HAM (Biro Hukum)
- Pengembangan kerjasama kesadaran hukum (Biro Hukum)
- Fasilitasi dan sosialisasi Produk Hukum (Biro Hukum)
- Pemasyarakatan HAM (Biro Hukum)
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan HAM (Biro Hukum)

Hasil yang dicapai program-program ini antara lain adalah kerjasama kesadaran hukum

➤ Program Peningkatan dan pengembangan Ekspor.

Padatahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan koordinasi peningkatan ekspor Non Migas melalui Panitia kerja Tetap Daerah (Biro Perekonomian).

Hasil yang dicapai program ini adalah meningkatnya Produk Non Migas.

➤ Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Perencanaan pengembangan pengarusutamaan Gender (Biro pemberdayaan Perempuan)
- Pengadaan komputer (Biro Pemberdayaan perempuan)
- Pelatihan Analisis Gender (Biro Pemberdayaan Perempuan)
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Biro Pemberdayaan perempuan)
- Fasilitasi TK, PP, FOCAL Point dan Pokja-Pokja (Biro Pemberdayaan perempuan)
- Penyusunan Data Terpilih ( Biro pemberdayaan Perempuan)
- Pembentukan Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Biro Pemberdayaan Perempuan)
- Pengadaan Meubilair P2TP2A (Biro Pemberdayaan Perempuan)
- Studi Banding Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Biro Pemberdayaan perempuan)

Hasil yang dicapai program ini antara lain meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan.

➤ Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan. Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pelatihan kepemimpinan Angkatan IV (Biro Pemberdayaan Perempuan)
- Sosialisasi/Penyuluhan untuk Remaja/SMU/Mahasiswa tentang reproduksi/narkoba, HIV AIDS, Pergaulan bebas/seks (Biro Pemberdayaan perempuan)
- Pelatihan Kader Korban kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Biro Pemberdayaan Perempuan
- Pendidikan Politik Perempuan (Biro Pemberdayaan Perempuan)
- Sosialisasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga UU No.23 Tahun 2004 (Biro pemberdayaan perempuan)

- Pelatihan Kader Pengurusutamaan Gender (Biro pemberdayaan Perempuan)

Hasil yang dicapai program ini antara lain meningkatnya pengetahuan politik perempuan dan kader. Korban KDRT serta meningkatnya kualitas kepemimpinan perempuan.

- Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Sosialisasi UU No.23 Tahun 2004 tentang perlindungan anak (Biro Pemberdayaan Perempuan)
- Penyelenggaraan Nikah Massal (Biro pemberdayaan Perempuan)

Hasil yang dicapai program ini adalah terselenggaranya pernikahan massal bagi masyarakat tidak mampu dan meningkatnya perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan akte kelahiran.

- Program Keserasian Kebijaksanaan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan produk hukum berkaitan dengan Pemberdayaan perempuan dan Anak (Biro Pemberdayaan perempuan)
- Koordinasi Organisasi Perempuan Provinsi dan kab/Kota (Biro Pemberdayaan Perempuan)
- Intensifikasi Isu-isu Gender lokal di kalteng (Biro Pemberdayaan Perempuan)
- Penyusunan sejarah Perjuangan Perempuan Kalteng (Biro Pemberdayaan Perempuan)
- Penyusunan materi PUG dan KDRT dalam jenjang Diklat Aparatur Negara (Biro pemberdayaan perempuan)
- Rakorda Pembangunan Pemberdayaan perempuan dan Anak (Biro Pemberdayaan Perempuan)

Hasil yang telah dicapai program ini antara lain terlaksananya Rakorda pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah serta Pelaksanaan Koordinasi

dengan Organisasi Perempuan serta teridentifikasi issue-isue gender lokal.

- Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama. Pada program ini dilaksanakan kegiatan biaya operasional pembinaan dan pelayanan kegiatan agama dan Urusan haji (Biro Tapra)  
Hasil yang dicapai kegiatan ini yaitu terlaksananya pendaftaran masyarakat yang melakukan kewajiban urusan haji
  
- Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan lembaga pendidikan Keagamaan. Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan penunjang operasional Pontren dan Madrasah.  
Hasil yang dicapai kegiatan ini penunjang operasional Perbantuan Keagamaan dan pendidikan Keagamaan.
  
- Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan koordinasi Pengawasan Perencanaan Logam Berat Mercury dalam ikan dan air sungai (Kerjasama Balai POM) Biro Perekonomian  
Hasil yang dicapai program ini adalah penyuluhan kepada masyarakat agar tidak membuang limbah mercury kedalam sungai.
  
- Program Penataan Administrasi Kependudukan. Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - Pembekalan aparat administrasi kependudukan (TOT/Pelatihan bagi aparat administrasi kependudukan di Jakarta) Biro Tapra
  - Pembekalan aparat Catatan Sipil (TOT bagi aparat catatan sipil di Jakarta) Biro Tapra
  - Pembinaan dan evaluasi administrasi kependudukan dan catatan sipil (kesipan pemda Kab/Kota dalam penerapan SIAK Offline/On Line dan Capll) Biro Tapra
  - Penunjang kegiatan SAK dan SIAK (Biro Tapra)

- Studi untuk penerapan sistem informasi kependudukan (SINDUK/SIAK/Pilot Project Kota Palangka Raya) Biro Tapra Hasil yang dicapai kegiatan-kegiatan program ini antara lain tersedianya Data kependudukan dan Catatan Sipil yang terintegrasi dan valid.
- Program Pengelolaan Sumberdaya manusia aparatur.
- Pada tahun anggaran ini melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Diklat penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP bagi pejabat Eselon IV dan III Provinsi dan kab./Kota
  - Rapat Penyusunan Program Kediklatan
  - Orintasi penyusunan Renstra pemerintahan
  - Diklatpim Tk.IV
  - Diklat Prajabatan Golongan I dan II
  - Diklat Prajabatan Golongan III
  - Diklat pemimpin Kegiatan
  - Diklat Pemegang Kas
  - Diklat Teknis Operator Telekomunikasi
  - Diklat Teknis Pengawasan Sumber Daya Perikanan
  - Diklat Pelatihan bagi Anggota DPRD Tk.I di Jakarta dan Tk.II di Palangka Raya tentang Proses pelatihan Anggaran pembangunan
  - Diklat Penyuluhan Perpajakan bagi unsur Keagamaan, Masyarakat Umum dan pengusaha
  - Diklat pengadaan Barang dan Jasa
  - Diklat Persiapan Pelatihan Purna Tugas
  - Diklat penataan dan pengembangan Perpustakaan
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.
- Padatahun anggaran ini melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Pembangunan gedung Asrama Diklat lantai II
  - Pembangunan pagar Kantor dan tempat parkir roda 2 dan 4
  - Pembangunan/penataan taman dan halaman kantor/asrama Diklat

- Pengadaan peralatan kantor/asrama dan alat belajar.

## 2) Bidang Pertanian dan Peternakan

Pada tahun anggaran 2006 bidang ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.23.174.158.396,00 atau 2,56% dari total Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran secara keseluruhan, anggaran pada bidang ini telah terealisasi sebesar Rp.20.591.091.504,00 atau 2,27% dengan demikian pada bidang ini masih terdapat sisa sebesar Rp.2.583.066.822,00 atau 88,85%. Pada bidang ini program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

### a) Sub Bidang Kehewan diprogramkan :

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 

Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

  - ❖ UPTD laboratorium dan klinik hewan
  - ❖ Rehab laboratorium dan klinik hewan
  - ❖ Fasilitasi koordinasi dengan ketahanan pangan
  - ❖ Pengadaan AC Split ruang kantor
  - ❖ Peningkatan prasarana dan sarana diklat
  
- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 

Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

  - ❖ Pengawasan pakan ternak
  - ❖ Pengendalian dan pencegahan flu burung
  - ❖ Penyusunan rencana teknis
  - ❖ Pembinaan dan pengembangan kawasan agropolitan
  - ❖ Pengembangan ruler rearing modification center ayam buras
  - ❖ Penyebaran informasi
  - ❖ Sosialisasi unit pelayanan pengolahan dan pemasaran hasil ternak
  - ❖ Sosialisasi kredit ketahanan pangan/KKP
  - ❖ Pengembangan agribisnis ternak
  - ❖ kelembagaan usaha ekonomi
  - ❖ Penyelenggaraan diklat teknis peternakan
  - ❖ Percontohan dan pembinaan pembuatan bio gas

Hasil yang telah dicapai program ini diantaranya adalah populasi sapi potong, kesehatan hewan, kualitas dan kuantitas sarana ternak serta pengetahuan pengembangan kawasan agropolitan.

**b) Sub Bidang Pertanian diprogramkan :**

➤ Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Sinkronisasi perencanaan dan pemantapan program ketahanan pangan
- ❖ Peningkatan sarana dan prasarana (penguatan kelembagaan pangan masyarakat)
- ❖ Pembinaan dan pendampingan kegiatan pertanaman di lahan eks PLG MT ASEP 2006 dan persiapan AKMAR 2006/2007
- ❖ Gerakan pengendalian hama tikus di lahan eks PLG Dadahup A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub> dan A<sub>5</sub>
- ❖ Pengendalian hama belalang kembara lintas Kab./Kota
- ❖ Peningkatan produksi tanaman pangan melalui PMI, PAT DAN TAM
- ❖ Peningkatan sarana dan prasarana (pendukung alat pertanian)
- ❖ Peningkatan produksi hortikultura melalui perluasan areal tanam (PAT)
- ❖ Penguatan kelembagaan pangan masyarakat
- ❖ Pengembangan perbenihan

➤ Program Pengembangan Agribisnis.

Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Sinkronisasi perencanaan dan pemantapan program pengembangan agribisnis
- ❖ Pengadaan Barang dan Jasa (pemberdayaan SPP SPMA)
- ❖ Pengembangan agribisnis hortikultura melalui pengembangan kawasan sentra hortikultura, promosi, kelembagaan tani

- ❖ Pengadaan tanah kebun percontohan, sarana laboratorium PHP, laboratorium benih, laboratorium agency hayati (pengembangan agribisnis hortikultura)
  - ❖ Pengadaan peralatan statistik pertanian (pengembangan agribisnis hortikultura)
  - ❖ Pengembangan agribisnis tanaman pangan melalui PKSP, pengembangan PKK, pembinaan teknologi dan analisa usaha tani
  - ❖ Pemberdayaan SPP SPMA Buntok
  - ❖ Pemberdayaan SPP SPMA Pangkalan Bun
  - ❖ Pemberdayaan SPP SPMA Sampit
  - ❖ Pemberdayaan SPP SPMA Tumbang Lahang
- Program Peningkatan Kerjasama Petani.
- Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- ❖ Peningkatan kesejahteraan petani tanaman pangan
  - ❖ Pembangunan sub terminal agribisnis/STA (peningkatan kesejahteraan petani tanaman pangan)
  - ❖ Pembangunan gedung tempat kerja (peningkatan kesejahteraan petani tanaman pangan)
  - ❖ Peningkatan kesejahteraan petani hortikultura
  - ❖ Pembenahan dan pembinaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan petani
- Hasil yang telah dicapai pada bagian program ini salah satunya adalah meningkatkan persediaan pangan.

### 3) Bidang Kelautan dan Perikanan

Pada tahun anggaran 2006 bidang ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.7.937.557.605,00 atau 0,87% dari total Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran secara keseluruhan, anggaran pada bidang ini telah terealisasi sebesar Rp.7.123.577.997,00 atau 0,78% dengan demikian pada bidang ini masih terdapat sisa sebesar Rp.815.979.608,00

- Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan. Pada program ini melaksanakan 2 kegiatan sebagai berikut :
  1. Pengembangan sistem sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian sumber daya alam.
  2. Fasilitasi pengembangan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil
  
- Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  1. Peningkatan operasional sarana dan prasarana perikanan
  2. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum
  3. Pengembangan BBI Murung Baki
  4. Pengembangan data statistik perikanan
  5. Pengembangan BBI Dirung Lingkin di Murung Raya
  6. Pengembangan BBI Talaken di Barito Timur
  7. Penataan dan pemanfaatan sumber daya ikan
  8. Pengembangan mutu dan pemasaran hasil
  9. Peningkatan dan pengembangan kawasan budi daya
  10. Pengendalian hama dan penyakit ikan
  11. Pengembangan kelembagaan
  12. Suaka perikanan

Hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain tersedianya benih ikan untuk dibudidayakan.

#### **4) Bidang Pertambangan dan Energi**

Pada tahun anggaran 2006 bidang ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.4.661.249.753,00 atau 0,51% dari total Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran secara keseluruhan, anggaran pada bidang ini telah terealisasi sebesar Rp.4.368.980.778,00 atau 0,48% dengan demikian pada bidang ini masih terdapat sisa sebesar Rp.292.268.975,00

Pada bidang ini program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Rehab gedung laboratorium dan gedung kerja pertambangan umum
- Pengadaan alat dan peralatan laboratorium
- Pengadaan alat-alat rumah tangga

- Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan.

Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pembinaan dan pengelolaan lingkungan terhadap pelayanan ketenagalistrikan pada jaringan trans 150 KVA di Kabupaten Kapuas dan Pulang Piasau.
- Rapat kerja bidang energi dan ketenaga listrikan di Palangkaraya.

- Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan, Usaha Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.

Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Survei penggunaan energi listrik di Kabupaten Gunung Mas
- Sosialisasi penanggulangan pengrusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik di Palangkaraya
- Inventarisasi pengembangan jaringan listrik desa di Kabupaten Kapuas dan Barito Timur
- Pemertaan jaringan listrik desa di Kabupaten Kapuas dan Barito Timur

- Program Pembinaan dan Pengawasan Sentra Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Seminar pertambangan se Kalimantan Tengah di Palangkaraya
- Sosialisasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Ijin KP Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian
- Pembinaan pelaksanaan Desent di Kabupaten Gunung Mas, Lamandau dan Sukamara
- Pembinaan penyiapan WPR di Kabupaten Seruyan
- Pembinaan penyiapan KP di Kabupaten Seruyan dan Sukamara
- Pendataan dan penyuluhan PETI di Kabupaten Pulang Pisau dan Katingan
- Rapat koordinasi penanggulangan PETI se Kalimantan Tengah di Palangkaraya
- Survey pemanfaatan sumber daya air satuan dan farm pada DAS Mentaya, Katingan, Seruyan
- Inventarisasi bahan galian industri di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau

Hasil yang telah dicapai program yang dilaksanakan antara lain terawasinya pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada jalur jaringan transmisi tegangan tinggi (SUTT).

#### **5) Bidang Kehutanan dan Perkebunan**

Pada tahun anggaran 2006 bidang ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.25.035.062.109,00 atau 2,77% dari total Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran secara keseluruhan, anggaran pada bidang ini telah terealisasi sebesar Rp.22.434.991.432,00 atau 2,48% dengan demikian pada bidang ini masih terdapat sisa sebesar Rp.2.600.070.677,00

Pada bidang ini program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

##### ➤ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Peningkatan sarana dan prasarana Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

- Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
  - Pengadaan sarana dan prasarana pembuatan bibit/benih tanaman hutan
- Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Terpeliharanya demplot (pengembangan hutan kemasyarakatan dan aneka usaha hutan)
  - Bintek tenaga penyuluh kehutanan (pembinaan, penyuluhan dan penegakan hukum)
  - Pengkajian pembinaan pangkalan, monitoring, transportasi, distribusi dan transaksi kayu log dan kayu gergajian
  - Inventarisasi rotan (pengembangan hutan kemasyarakatan dan aneka usaha kehutanan)
  - Evaluasi perijinan penggunaan peralatan PH (pembinaan usaha pemanfaatan dan pengelolaan HPL)
  - Bintek usaha hutan rakyat bagi masyarakat petani (pengembangan hutan kemasyarakatan dan aneka usaha hutan)
  - Tata batas sementara hutan lindung Gunung Bondang dan Liang Mahajo (penempatan PM Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah)
  - Pembuatan tata batas definitif hutan lindung Gunung Bondang dan HL. Liang Mahajo (pemantapan dan penataan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah)
  - Penyelesaian tata batas areal hutan lindung Gunung Bondang dan HL. Liang Mahajo (pemantapan dan penataan kawasan hutan)
  - Monitoring dan evaluasi kegiatan perijinan perusahaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan di 13 Kabupaten/Kota
  - Penyusunan neraca sumber daya hutan
  - Pembinaan pengoperasian jaringan basis data kehutanan (pembuatan LAN)

➤ Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)  
Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pengamanan hutan terpadu
- Persiapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan)
- Kampanye/sosialisasi pencegahan dampak kebakaran hutan dan lahan
- Bintek pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan)

➤ Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pemeliharaan tanaman, rehabilitasi tanaman wisata alam tangkiling
- Koordinasi dan pembahasan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan (pembinaan, pengendalian dan pengawasan)
- Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan GN-RHL dan DAK-DR
- Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
- Pelatihan penilaian mutu bibit dan tanaman dalam rehabilitasi hutan (pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan)

Hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan GN-RHL dan DAK-DR.

## **6) Bidang Perindustrian dan Perdagangan**

Pada tahun anggaran 2006 bidang ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.8.793.769.170,00 atau 0,97% dari total Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran secara keseluruhan, anggaran pada bidang ini telah terealisasi sebesar Rp.8.297.279.007,00 atau 0,91% dengan demikian pada bidang ini masih terdapat sisa sebesar Rp.496.490.163,00

Pada bidang ini program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

➤ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan perlengkapan aula/ruang rapat dan meja kursi pada Sub Bidang Metologi
- Pembuatan dinding partisi ruang kerja, perbaikan jendela, pembuatan pintu dan pengecatan ruang Kepala Sub Dinas Perindustrian dan Sub Dinas Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah
- Rehab laboratorium meter air dan pengecatan tower air Sub Dinas Metologi
- Rehab aula/ruang rapat, penataan lingkungan dan pembuatan plang kantor Dinas Perindag Provinsi Kalimantan Tengah
- Pengadaan komputer, printer, UPS, handycam dan kamera digital
- Pengaspalan jalan lingkungan dan revitalisasi taman Sub Dinas Metologi Dinas Perindag Provinsi Kalimantan Tengah

➤ Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan buku aneka prdoduk industri agro di Kalimantan Tengah (pembinaan sentra industri kecil)
- Pelatihan teknis anyaman rotan bagi calon pengrajin generasi muda perempuan di Palangkaraya
- Bintek pengusaha pengolahan minyak kelapa terpadu di Bahaur Kabupaten Pulang Pisau
- Pengadaan sample barang kerajinan binaan Dekranasda (pemberdayaan dekranasda)
- Pemeliharaan dan perawatan thowerroom Dekranasda
- Diklat teknis bordir dan bantuan mesin bordir bagi PKK se Kalimantan Tengah tahun 2006
- Penyusunan rencana teknis pengembangan industri kecil Kalimantan Tengah (pembinaan sentra industri kecil)

- Sinkronisasi program 2007 di Palangkaraya (pembinaan industri kecil)
  - Diklat pengolahan limbah industri tahu tempe (diklat dan monitoring)
  - Bimbingan, monitoring dan evaluasi pengolahan limbah industri di 14 Kabupaten/Kota (diklat pengelolaan limbah industri)
  - Monitoring, pengambilan dan pengujian insektisida pada produksi ikan kering di 6 LKS
  - Bintek pengelolaan ikan kering bagi aparat se Kalimantan Tengah di Palangkaraya
  - Mengikuti pameran produk unggulan Dekranas tingkat nasional di Jakarta (pemberdayaan Dekranasda)
- Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor  
Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Pameran yogya expo 2006 (promosi komoditi ekspor Kalimantan Tengah)
  - Mengikuti pameran di Jakarta-PRJ (promosi komoditi ekspor Kalimantan Tengah)
  - Pengelolaan dan pengumpulan data ekspor non migas (promosi komoditi ekspor Kalimantan Tengah)
- Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan  
Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Pengawasan dan penyuluhan alat UTTP di 14 Kabupaten/Kota
  - Bintek perdagangan dalam negeri (pemantapan harga sembako dan barang strategis serta layanan info harga)
  - Pengarahan pelaksanaan program tahun 2006 di Palangkaraya (pemantauan harga sembako dan barang strategis serta layanan info harga)

- Pemantauan harga sembako dan barang strategis (pemantauan harga sembako dan barang strategis serta layanan info harga)
- Pembinaan dan pengembangan surat monitor open LPKSM di Kalimantan Tengah (PK melalui promo/sas pengawasan barang beredar)
- Pasar murah menjelang hari besar keagamaan (penyelenggaraan pasar murah)
- Sosialisasi perlindungan konsumen (perlindungan konsumen melalui promo/sas pengawasan barang beredar dan tera ulang)
- Verifikasi alat-alat standar metologi (perlindungan konsumen melalui promo/sas pengawasan barang beredar dan tera)
- Sidang tera dan tera ulang UTTP (perlindungan konsumen melalui promo/sas pengawasan barang beredar dan tera ulang)
- Pengawasan barang beredar di 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah (perlindungan konsumen melalui promo/sas pengawasan barang beredar dan tera)
- Partisipasi pameran di Palangkaraya (pemantauan harga sembako dan barang strategis serta layanan info harga)
- Pelayanan informasi harga di 8 Kabupaten pemekaran (pemantauan harga sembako dan barang strategis serta layanan info harga)

Hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain ketersediaan barang murah kepada masyarakat.

## **7) Bidang Perkoperasian**

Pada tahun anggaran 2006 bidang ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.4.542.301.260,00 atau 0,50% dari total Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran secara keseluruhan, anggaran pada bidang ini telah terealisasi sebesar Rp.4.318.104.461,00 atau 0,47% dengan demikian pada bidang ini masih terdapat sisa sebesar Rp.224.196.799,00

Pada bidang ini program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

➤ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pada tahun anggaran ini melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Rehab gedung aula dan pagar Kantor Koperasi dan UKM
- Pengadaan peralatan kantor
- Bantuan RMU untuk koperasi pangan eks PLG

➤ Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM

Pada tahun anggaran ini melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Peningkatan dan pengembangan koordinasi pemberdayaan KUKM, kelembagaan koperasi serta kewirausahaan
- Penumbuhan dan pengembangan BDS
- Penguatan jaringan informasi dan akses produk KUKM

➤ Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

Pada tahun anggaran ini melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pameran produk koperasi, usaha kecil dan menengah
- Pelatihan dan pengembangan bintek usaha kecil dan menengah serta kalster bisnis UKM

Hasil yang telah dicapai pada program ini adalah terwujudnya ketetapan arah dan langkah pemberdayaan KUKM, kelembagaan koperasi serta kewirausahaan KUKM, BDS/LPB.

## 8) Bidang Penanaman Modal Daerah

Pada tahun anggaran 2006 bidang ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.5.893.815.445,00 atau 0,65% dari total Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran secara keseluruhan, anggaran pada bidang ini telah terealisasi sebesar Rp.5.435.900.532,00 atau 0,60% dengan demikian pada bidang ini masih terdapat sisa sebesar Rp.457.914.913,00

Pada bidang ini program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

➤ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Rehab kantor Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- Pengadaan alat-alat kantor Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

➤ Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Rapat koordinasi perencanaan modal daerah (RKPMD)
- Penyusunan profil komoditi unggulan (lanjutan)
- Penyusunan/pembuatan buku direktori mitra usaha potensial
- Penyuluhan investasi dalam rangka pemberdayaan UKM dan koperasi
- Penyusunan/pembuatan buku direktori prasarana dan sarana penunjang investasi di daerah
- Pra persiapan rapat KP<sub>3</sub>MR
- Konsolidasi perencanaan pelaksanaan penanaman modal regional (KP<sub>3</sub>MR) se Kalimantan Tengah
- Pembelajaran peningkatan iklim investasi di Provinsi Gorontalo

➤ Program Promosi dan Kerjasama Investasi

Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pameran indonesia investment expo 2006 di Makasar
- Temu usaha
- Pameran agro and food expo 2006 di Jakarta
- Sosialisasi penanaman modal kepada non dunia usaha di Palangkaraya
- Pengembangan kerjasama penanaman modal dengan instansi dunia usaha di Palangkaraya
- Pameran jinvest tahun 2006 di Jakarta
- Gelar potensi dan peluang investasi tahun 2006 di Jakarta
- Rakerda dan temu usaha di Palangkaraya

- Pameran produksi ekspor daerah (PPED) di Yogyakarta
  - Pameran Indonesia Solo Exhibition di Korea Selatan
  - Penyelenggaraan pra pertemuan BIMP.EAGA-AIDA di Palangkaraya
  - Pembuatan bahan promosi leaflet dan booklet
- Program Penguatan Kelembagaan dan Sistem Informasi
- Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Pelatihan teknis bagi aparatur, TOT bidang penanaman modal
  - Pengembangan sistem manajemen informasi terpadu (SIMIT)
- Program Evaluasi, Pengawasan dan Pembinaan terhadap Perijinan yang Sudah.
- Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Penyempurnaan pedoman pelayanan administrasi umum penanaman modal dan tata cara perijinan
  - Bimbingan teknis pengendalian penanaman modal se Kalimantan Tengah
  - Bimbingan teknis pemulihan kegiaian perusahaan PMA/PMDN yang mengalami kesulitan
  - Sosialisasi kebijakan penanaman modal dalam rangka otonomi daerah
  - Sosialisasi pelaksanaan perundang-undangan penanaman modal di Palangkaraya
  - Sosialisasi pelayanan fasilitas penanaman modal di Palangkaraya
  - Sosialisasi/penyuluhan perijinan penanaman modal terhadap dunia usaha dan masyarakat
  - Penyusunan buku data perusahaan PMA/PMDN dan non fasilitas PMA/PMDN di 14 Kabupaten/Kota tahun 2006
  - Rapat evaluasi penanaman modal se Kalimantan Tengah
  - Bimbingan dan penyuluhan ketentuan pelaksanaan penanaman modal

- Penyusunan standarisasi prosedur pelayanan prima penanaman modal
  - Penyusunan rancangan perda penanaman modal
  - Evaluasi perijinan dan fasilitas terhadap realisasi penggunaan fasilitas bagi perusahaan PMA/PMDN di 13 Kabupaten
  - Pemantauan (monitoring) terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan perusahaan PMA/PMDN di 13 Kabupaten
  - Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan perusahaan PMA/PMDN di 13 Kabupaten
- Program Pendidikan Non Formal.
- Pada tahun anggaran ini dilaksanakan pelatihan aparaturnya IPMP, IPMK, dalam pengelolaan data SIMIT di Palangkaraya.
- Hasil yang telah dicapai pada program ini adalah orang mengetahui potensi dan peluang investasi yang ada di Kalimantan Tengah.

#### **9) Bidang Ketenagakerjaan**

Pada tahun anggaran 2006 bidang ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.6.167.459.782,00 atau 0,68% dari total Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran secara keseluruhan, anggaran pada bidang ini telah terealisasi sebesar Rp.5.876.196.141,00 atau 0,65% dengan demikian pada bidang ini masih terdapat sisa sebesar Rp.291.263.641,00

Pada bidang ini program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Penyempurnaan pedoman pelayanan administrasi umum penanaman modal dan tata cara perijinan
- Renovasi gedung kantor tempat kerja
- Sosialisasi pemagangan ke Jepang di 14 Kabupaten/Kota
- Pelatihan non institusional
- Uji keterampilan sertifikasi
- Penyusunan/penetapan UMP
- Pemantauan pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

- Sosialisasi UMP
- Pengawasan UMP Jamsostek
- Sosialisasi dan pembinaan tenaga kerja purna tugas
- Operasional PHD (penyelesaian kasus PHI/PHK)
- Temu evaluasi TKPMP di 6 Kabupaten/Kota
- Survey ketenagakerjaan
- Penyusunan evaluasi kinerja
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- Bintek perencanaan tenaga kerja berbasis gender bagi pekerja dan pengusaha
- Penyuluhan dan penyebaran informasi ketenagakerjaan
- Pengembangan program-program padat karya produktif
- Penyusunan profil ketenagakerjaan
- Penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah
- Penempatan tenaga kerja sektor kelapa sawit
- Temu evaluasi eks TKS pemanduan dan terapan TPK di 6 Kabupaten/Kota
- Pemanduan dan terapan TPK sistem kelompok di 4 Kabupaten
- Pemanduan dan koordinasi TKA di 5 Kabupaten
- Monitoring dan koordinasi lowongan/kesempatan kerja di 8 Kabupaten
- Penyuluhan bimbingan jabatan di 4 kabupaten
- Penyusunan program/kegiatan APBD
- Rapat koordinasi lintas Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah  
Hasil yang telah dicapai pada program ini diantaranya tersedianya data profil ketenagakerjaan.

#### **10)Bidang Kesehatan**

Pada tahun anggaran 2006 bidang ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.74.580.091.262,00 atau 8,25% dari total Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran secara keseluruhan, anggaran pada bidang ini telah terealisasi sebesar Rp.69.175.098.546,00 atau 7,65% dengan demikian pada bidang ini masih terdapat sisa sebesar Rp.5.404.992.716,00

Pada bidang ini program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

➤ Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pelatihan model pelayanan daerah terpencil (pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya)
- Pemetaan data perijinan tenaga kesehatan dan institusi di Kabupaten/Kota (peningkatan yankes pasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, KIA, KB, perbaikan gizi, kesling dan P2M)
- Pengadaan peralatan kantor (pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik)
- Rehabilitasi gedung kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan)
- Review perijinan tenaga kesehatan dan institusi kesehatan di Kabupaten/Kota (peningkatan yankes pasar yang mencakupi sekurang-kurangnya promosi kesehatan, KIA, KB, perbaikan gizi, kesling dan P2M)
- Pembangunan pustu, pengadaan alat medis dan meubelair (pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya)
- Pengadaan obat-obatan psikologi Balai Kesehatan Jiwa Kalawa Atei Palangkaraya
- Workshop utilitas alat kesehatan (peningkatan yankes pasar yang mencakupi sekurang-kurangnya promosi kesehatan, KIA, KB, perbaikan gizi, kesling dan P2M)
- Pelatihan safe community (peningkatan yankes pasar yang mencakupi sekurang-kurangnya promosi kesehatan, KIA, KB, perbaikan gizi, kesling dan P2M)
- Pelatihan modul A dan B penanggulangan kegawatdaruratan dalam bencana (peningkatan yankes pasar yang mencakupi sekurang-kurangnya promosi kesehatan, KIA, KB, perbaikan gizi, kesling dan P2M)
- Pengumpulan data inventarisasi kebutuhan operasional kebijakan dasar puskesmas (peningkatan yankes pasar yang

mecakupi sekurang-kurangnya promosi kesehatan, KIA, KB, perbaikan gizi, kesling dan P2M)

- Pelatihan QA pelayanan prima di puskesmas (peningkatan yankes pasar yang mencakupi sekurang-kurangnya promosi kesehatan, KIA, KB, perbaikan gizi, kesling dan P2M)
- Bimtek penyelenggaraan pelayanan prima puskesmas (peningkatan yankes pasar yang mencakupi sekurang-kurangnya promosi kesehatan, KIA, KB, perbaikan gizi, kesling dan P2M)

➤ Program Upaya Kesehatan Perorangan.

Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pelayanan operasi katarak di RSUD (pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III RS)
- Konsultasi program ke RSUD dr. Soetomo dan rujukan dokter ahli/bidan/perawat ahli dari RSUD dr. Soetomo (peningkatan kualitas rumah sakit)
- Penilaian dokter/dokter gigi, paramedis, nakes teladan (peningkatan kualitas rumah sakit)
- Pemantapan RSSI/RSSB (peningkatan kualitas rumah sakit)
- Rujukan dokter spesialis jiwa dari RSJ tamban banjarmasin (peningkatan kualitas balai kesehatan jiwa)
- Penyuluhan kelompok (peningkatan kualitas balai kesehatan jiwa)
- Pelatihan fasilitator interpersonal (peningkatan kualitas balai kesehatan jiwa)

➤ Program Sumber Daya Kesehatan.

Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pertemuan penyegaran SIPTK di institusi diknakes (peningkatan ketrampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan)

- Fasilitas dan koordinasi pengembangan tenaga kesehatan (pengembangan tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan)
- Workshop pengembangan manajemen SDM kesehatan (pengembangan tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan)
- Persiapan dan pelaksanaan akreditasi rumah sakit kabupaten (penyusunan standar kompetensi dan regulasi profesi kesehatan)
- Koordinasi dan konsultasi pasca akreditasi akreditasi Bapelkes Palangkaraya (penyusunan standar kompetensi dan regulasi profesi kesehatan)
- Pengembangan fasilitas dan koordinasi program sarana dan prasarana kesehatan (peningkatan ketrampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan)
- Peningkatan ketrampilan dan profesional tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan (pengadaan fasilitas saran Bapelkes Palangkaraya)
- Pengembangan, fasilitasi dan koordinasi program diknakes (peningkatan ketrampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan)
- Pertemuan persiapan dalam rangka sosialisasi intensif tenaga kesehatan di daerah sangat terpencil (pemenuhan kebutuhan nakes, terutama untuk yankes di puskesmas dan jaringannya serta RS Kabupaten/Kota)
- Pelatihan penyusunan standar kompetensi dan regulasi progesi tenaga bidan di puskesmas dan RS (pelatihan standar kopentensi dan regulasi profesi kesehatan)
- Sosialisasi jabatan fungsional di lingkungan kesehatan (pembinaan tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan)
- Pertemuan pengelola tenaga kesehatan (pembinaan standar kopetensi dan regulasi profesi kesehatan)

- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.  
Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - Pelatihan dan pengumpulan data PHBS (peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat)
  - Pengadaan media penyuluhan (pengembangan media promkes dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi/KIE)
  - Penyelenggaraan jambore posyandu (peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat)
  - Lomba balita sehat indonesia (LBSI) (peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat)
  - Lomba toga/posyandu (peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat)
  - Pertemuan SBH tingkat nasional (peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat)
  - Kemitraan KB-kesehatan-TNI manunggal, bhayangkara dan PKK (pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan generasi muda)
  - Perkemahan wirakarya SBH se Kalteng (peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat)
  - Pertemuan evaluasi dan bintek program KIA (peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat)
  - Promosi pekan ASI (pengembangan media promkes dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
  
- Program Lingkungan Sehat.  
Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - Fasilitasi program Kabupaten/Kota sehat (pengembangan wilayah sehat)
  - Penilaian program Kabupaten/Kota sehat (pengembangan wilayah sehat)
  - Pengadaan alat pengolah data
  - Pengadaan masker (pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan)

- Konsultasi program ke pusat (pengembangan wilayah sehat)
  - Bimbingan teknis (pengembangan wilayah sehat)
  - Pengadaan penjernih air cepat (pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan)
  - Pelatihan antisipasi pencemaran air raksa (pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan)
  - Identifikasi pencemaran air raksa (pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan)
- Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
- Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko
  - Pertemuan koordinasi tim terpadu pemberantasan penyakit bersumber binatang (peningkatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit)
  - Pemeliharaan cold chain dan cold room (peningkatan imunisasi)
  - Pengadaan peralatan dan bahan untuk upaya peningkatan imunisasi (peningkatan imunisasi)
  - Rekrutmen TKHI dan TKHD (peningkatan imunisasi)
  - Pengadaan alat kesehatan untuk pencegahan dan penanggulangan faktor resiko
  - Penyediaan bahan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah (peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah)
  - Pertemuan koordinasi lintas program (peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah)
  - Pengumpulan data surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah (peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah)
  - Survey kasus KIPI (penemuan dan tatalaksana penderita)
  - Pengadaan bahan laboratorium dan obat program TB dan HIV (penemuan dan tatalaksana penderita)
  - Bantuan perawatan kasus KIPI (penemuan dan tatalaksana penderita)

- Peningkatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit
  - Pengadaan alat pengolahan data (peningkatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit)
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
- Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Pengumpulan data konsumsi gizi (PKG) (peningkatan surveilens gizi)
  - Intervensi gizi dan kesehatan (peningkatan surveilens gizi)
- Program Perbaikan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan.
- Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Pertemuan penyusunan RKA-SKPD (pengembangan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan serta hukum kesehatan)
  - Daya terima pasien rawat inap terhadap menu makan siang di RSUD Drs. Doris Sylvanus Palangkaraya (pengkajian dan penyusunan kebijakan)
  - Pelatihan penyusunan anggaran berbasis kinerja bidang kesehatan (pengembangan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan serta hukum kesehatan)
  - Monev pelaksanaan program APBD (pengembangan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan serta hukum kesehatan)
  - Pengadaan komputer untuk perencanaan puskesmas (pengembangan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan serta hukum kesehatan)

- Monev sistem kesehatan daerah (pengembangan sistem kesehatan daerah)
  - Survei pemetaan potensi JPK (peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat secara kapitasi dan pra upayaq terutama bagi penduduk miskin yang berkelanjutan)
  - Pengadaan sarana administrasi keuangan (penyediaan sarana dan prasarana agar berfungsinya manajemen kesehatan)
  - Penelitian cost illness DBD di RSUD Sampit (pengkajian dan penyusunan kebijakan)
  - Tinjauan standar makanan, cita rasa makanan dan status gizi siswa SMU Plus Palangkaraya (pengkajian dan penyusunan kebijakan)
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
- Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Pengumpulan data obat, sarana dan prasarana pengelolaan obat Kabupaten/Kota (peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan)
  - Sosialisasi dan advokasi pembnaan dan fasilitasi kebijakan obat dan kefarmasian (peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk pendduuk miskin)
- Program Pengembangan Obat Asli Indonesia.
- Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Sosialisasi dan advokasi regulasi (kepmenkes dan permenkes) LP dan LS (peningkatan promosi pemanfaatan obat bahan alam indonesia)
  - Pengembangan dan penelitian tanaman obat khas Kalimantan Tengah (penelitian dan pengembangan tanaman obat)
- Program Pengawasan Obat dan Makanan.

Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan spektrophotometer (peningkatan pengawasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif)

Hasil dicapai pada program-program di atas antara lain meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas kesehatan.

#### **11)Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**

Pada tahun anggaran 2006 bidang ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.57.044.943.342,00 atau 6,31% dari total Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran secara keseluruhan, anggaran pada bidang ini telah terealisasi sebesar Rp.55.872.561.607,58 atau 6,18% dengan demikian pada bidang ini masih terdapat sisa sebesar Rp.1.172.381.734,42

Pada bidang ini program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

##### ➤ Program Pendidikan Anak Usia Dini.

Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pembinaan, pengembangan dan mutu TK (pembinaan taman kanak-kanak)
- Pembinaan, pengembangan dan mutu TK (pertemuan tiga komponen kepala TK)
- Pembinaan, pengembangan dan mutu TK (rehabilitasi gedung taman kanak-kanak)
- Pembinaan pengembangan dan peningkatan manajemen PAUD (non formal)
- Pembinaan pengembangan dan peningkatan manajemen PAUD (sosialisasi dan pemasyarakatan program PAUD non formal)
- Pembinaan pengembangan dan peningkatan manajemen PAUD (penyelenggaraan HAN tingkat pusat dan daerah)
- Pembinaan pengembangan dan peningkatan manajemen PAUD (pengadaan sarana dan prasaran)

- Pembinaan pengembangan dan peningkatan manajemen PAUD (pemantauan dan monitoring kegiatan program PAUD non formal)
- Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.  
Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Perluasan, paket mutu dan manajemen pendidikan pada SD (rehabilitasi dan pembangunan gedung SD/MI)
- Perluasan, paket mutu dan manajemen pendidikan pada SD (pengadaan buku pokok)
- Perluasan, paket mutu dan manajemen pendidikan pada SD (pemantauan ujian sekolah dan pembinaan belajar mengajar SD/MI)
- Perluasan, paket mutu dan manajemen pendidikan pada SD (pelatihan kinerja kepala sekolah SD/MI)
- Perluasan, paket mutu dan manajemen pendidikan pada SD (pelatihan guru penjaskes SD/MI)
- Perluasan, paket mutu dan manajemen PLB (rekapitulasi/tambahban kelas baru SDLB/SLB)
- Perluasan, paket mutu dan manajemen PLB (pengadaan alat pengolahan data PLB)
- Perluasan, paket mutu dan manajemen PLB (perj. Untuk kont lb prest dan kreat siswa/guru SDLB/SLB TK nasional)
- Perluasan, paket mutu dan manajemen PLB (studi banding guru PLB/SLB)
- Perluasan, paket mutu dan manajemen PLB (meng. Or khusus penyandang tuna grahita binaan SOINA Provinsi Kalteng)
- Perluasan, paket mutu dan manajemen PLB (pemantauan dan evaluasi SDLB/PLB)
- Perluasan, peningkatan mutu dan manajemen pendidikan SLTP (rakor dan sinkron program pendataan wajar 9 tahun)
- Perluasan, peningkatan mutu dan manajemen pendidikan SLTP (rehab, meubelair, sarana penunjang dan alat)

- Perluasan, peningkatan mutu dan manajemen pendidikan SLTP (lomba sekolah sehat, olimpiade, sains, porseni SMP)
  - Perluasan, peningkatan mutu dan manajemen pendidikan SD (pengadaan buku laporan hasil pembelajaran non formal)
  - Perluasan, peningkatan mutu dan manajemen pendidikan SD (pengadaan buku modul paket A, paket B)
  - Perluasan, peningkatan mutu dan manajemen pendidikan SD (pemantauan dan evaluasi program pendidikan luar sekolah non formal)
  - Perluasan, peningkatan mutu dan manajemen pendidikan SD (perluasan, peningkatan mutu dan manajemen pendidikan luar biasa)
  - Perluasan, peningkatan mutu dan manajemen pendidikan SD (kesetaraan paket A setara SD dan paket B setara SMP non formal)
  - Perluasan, paket mutu dan manajemen pendidikan pada SD (pencetakan ijazah SD/MI)
- Program Pendidikan Menengah.
- Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Perluasan, peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan di SMU (pengadaan sarana dan prasarana SMA)
  - Perluasan, peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan di SMU (BOP SMU Plus Palangkaraya)
  - Perluasan, peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan di SMU (akreditasi SMA tahun 2006)
  - Perluasan, peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan di SMU (olimpiade MIPA SMA 2006)
  - Perluasan, peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan di SMU (survisi/validasi data SMA)
  - Perluasan, peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan SMK (pengadaan sarana dan prasarana SMK)
  - Perluasan, peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan SMK (akreditasi SMK tahun 2006)

- Perluasan, peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan SMK (survisi/validasi data SMK)
  - Seminar kependidikan
  - Sekolah favorit
  - Seleksi guru berprestasi tingkat provinsi
- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
- Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Pengembangan perpustakaan SD (pengadaan buku perpustakaan dan meubelair SD/MI)
  - Pengembangan perpustakaan SD (paket kemampuan pengelolaan perpustakaan sekolah melalui pelatihan)
  - Pengembangan perpustakaan SD (pemantauan dan supervisi)
- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Pengembangan BPKB Kalteng pemberdayaan tenaga PLS (rehab ruang dapur menjadi ruang serbaguna)
  - Pengembangan BPKB Kalteng pemberdayaan tenaga PLS (pembangunan pagar tembok)
  - Pengembangan BPKB Kalteng pemberdayaan tenaga PLS (pembangunan workshop/bengkel kerja)
  - Pengembangan BPKB Kalteng pemberdayaan tenaga PLS (pembuatan drainase, penimbunan dan pengaspalan)
  - Pengembangan BPKB Kalteng pemberdayaan tenaga PLS (pembangunan tower air)
  - Pengembangan BPKB Kalteng pemberdayaan tenaga PLS (pengadaan sarana dan prasarana kantor)
  - Pengembangan BPKB Kalteng pemberdayaan tenaga PLS (pemberdayaan KBU meubelair/kayu)
  - Pengembangan BPKB Kalteng pemberdayaan tenaga PLS (kelompok belajar usaha batako dan paving)

- Pengembangan BPKB Kalteng pemberdayaan tenaga PLS (pemberdayaan kursus menjahit)
- Pengembangan BPKB Kalteng pemberdayaan tenaga PLS (pemberdayaan bimbingan belajar matematika)
- Pengembangan BPKB Kalteng pemberdayaan tenaga PLS (pemberdayaan bimbingan belajar bahasa inggris)
- Pengembangan BPKB Kalteng pemberdayaan tenaga PLS (pembangunan RKB PAUD "Jelita" tahap awal)
- Pengembangan BPKB Kalteng pemberdayaan tenaga PLS (sub kelompok belajar usaha batako dan paving)
- Pengembangan BPKB Kalteng pemberdayaan tenaga PLS (sub pemberdayaan KBU meubelair/kayu)
- Pengembangan BPKB Kalteng pemberdayaan tenaga PLS (sub pemberdayaan kursus menjahit)
- Pengembangan balai tekkom dikbud (pengadaan media/program pembelajaran untuk SD/MI, SPM/MTs dan PLS)
- Pengembangan balai tekkom dikbud (pelatihan pemanfaatan media instruksional)
- Pengembangan balai tekkom dikbud (pembuatan film dokumenter pendidikan/kebudayaan)
- Pengembangan balai tekkom dikbud (pemanfaatan program pembelajaran kelas rangkap untuk SD)
- Pengembangan BPKB-KT pemberdayaan tenaga PLS (pembekalan tenaga tutor paket C (PNF))
- Pengembangan BPKB-KT pemberdayaan tenaga PLS (pembekalan sumber belajar/narasumber/lembaga kursus diklusemas tata rias pengantin adat dayak (PNF))
- Pengembangan BPKB-KT pemberdayaan tenaga PLS (pembekalan sumber belajar/narasumber/lembaga kursus diklusemas tata rias kecantikan (PNF))
- Pengembangan BPKB-KT pemberdayaan tenaga PLS (pengadaan alat pengolah data PNF dan pengadaan buku modul)
- Pengembangan BPKB-KT pemberdayaan tenaga PLS (penyelenggaraan program paket C)

- Pengembangan BPKB-KT pemberdayaan tenaga PLS (penyelenggaraan ujian nasional paket C)
  
- Program Pendidikan Tinggi.  
Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - Pengembangan peningkatan mutu dan manajemen pendidikan tinggi (rapat koordinasi PTN/PTS)
  - Pengembangan peningkatan mutu dan manajemen pendidikan tinggi (koordinasi dan konsultasi masalah PTN/PTS)
  - Pengembangan peningkatan mutu dan manajemen pendidikan tinggi (pemantauan dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana PTN/PTS)
  - Pengembangan peningkatan mutu dan manajemen pendidikan tinggi (pengadaan meubelair PTN/PTS)
  - Pengembangan peningkatan mutu dan manajemen pendidikan tinggi (penunjang kegiatan operasional PTS di Kalimantan Tengah)
  - Pengembangan peningkatan mutu dan manajemen pendidikan tinggi (penunjang kegiatan belajar mahasiswa S2 dan S3 PTN/PTS)
  - Pengembangan peningkatan mutu dan manajemen pendidikan tinggi (pengadaan peralatan PTN/PTS)
  - Pengembangan peningkatan mutu dan manajemen pendidikan tinggi (workshop bagi dosen PTN/PTS)
  - Pengembangan peningkatan mutu dan manajemen pendidikan tinggi (penunjang kegiatan operasional kegiatan belajar mahasiswa kurang mampu D2/PGSD, D3, S1 dan Universitas Terbuka)
  - Pengembangan peningkatan mutu dan manajemen pendidikan tinggi (pertemuan sarjana yang peduli terhadap pembangunan Kalteng)
  
- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Meningkatkan kemampuan dan kinerja (penyusunan dan pengolahan data pendidikan dan kebudayaan)
- Pengelolaan dan pelayanan administrasi kantor (peningkatan sarana dan prasarana Dinas P dan K Kalteng/TU)
- Pengelolaan dan pelayanan administrasi kantor (pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas P dan K/TU)
- Pengelolaan dan pelayanan administrasi kantor (peningkatan jaringan informasi teknologi Dinas P dan K/TU)
- Pengelolaan dan pelayanan administrasi kantor (pelayanan umum Dinas P dan K/TU)
- Meningkatkan kemampuan dan kinerja (penyusunan rencana dan program pendidikan dan kebudayaan)
- Meningkatkan kemampuan dan kinerja (pengembangan pendidikan dan hubungan antar lembaga)
- Meningkatkan kemampuan dan kinerja (monitoring pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan)
- Meningkatkan kemampuan dan kinerja (penyusunan dan pengolahan data pendidikan dan kebudayaan/sub pengadaan alat pengolahan data pendidikan dan kebudayaan)
- Meningkatkan kemampuan dan kinerja (pengadaan alat pengolah data dan informasi pendidikan dan kebudayaan)
- Meningkatkan kemampuan dan kinerja (pengkajian, pengembangan dan inovasi pendidikan dan kebudayaan)
- Meningkatkan kemampuan dan kinerja (pendataan kebutuhan pendidik dan tendik di daerah terpencil/ tertinggal)
- Meningkatkan kemampuan dan kinerja (rapat koordinasi perencanaan kebutuhan tendik di daerah terpencil/ tertinggal)
- Meningkatkan kemampuan dan kinerja (peningkatan juknis dan juklak pemerian bantuan subsidi untuk tendik di daerah)
- Meningkatkan kemampuan dan kinerja (verifikasi data pendidik dan tenaga kependidikan di daerah terpencil/ tertinggal)

- Meningkatkan kemampuan dan kinerja (dana shering dalam rangka pengembangan infrastruktur ICT dan MAPPING pendidikan)
- Program Pengelolaan Kebudayaan Daerah.  
Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Pembinaan permuseuman (pameran khusus temporer)
- Pembinaan permuseuman (lomba olah raga tradisional dalam rangka memeriahkan pameran)
- Pembinaan permuseuman (pameran khusus regional)
- Pembinaan permuseuman (penyusunan label koleksi)
- Pembinaan permuseuman (survey koleksi)
- Pembinaan permuseuman (rapat koordinasi lintas instansi terkait)
- Pembinaan permuseuman (penataan dan keasrian halaman/koleksi)
- Pembinaan permuseuman (rehab gedung dan pengadaan peralatan teknis kantor)
- Pembinaan seni budaya (pelatihan pelatih seni di Yogyakarta)
- Pembinaan seni budaya (peningkatan kreativitas group/sanggar seni Kabupaten/Kota dalam rangka HUT RI)
- Pembinaan seni budaya (temu budaya se Indonesia di Sulteng dalam rangka festival seni budaya, temu seni dan birokrat kebudayaan)
- Pembinaan seni budaya (pelatihan tenaga guru seni tingkat SLTA Kabupaten/Kota)
- Pembinaan seni budaya (pagelaran seni dan budaya di TMII dalam rangka HUT TMII di Jakarta)
- Pembinaan seni budaya (pagelaran seni dalam rangka hari besar nasional)
- Pemb. trad. peninggalan sejarah dan kepurbakalaan (pendokumentasian dan monitoring upacara adat Kalimantan Tengah)
- Pembinaan seni budaya (lawatan sejarah daerah Kalimantan Tengah untuk guru dan siswa SLTA)

- Pembinaan seni budaya (parade dan diskusi budaya tingkat SLTA dalam rangka HUT RI)
- Pembinaan seni budaya (rehabilitasi benda cagar budaya)
- Pembinaan seni budaya (pameran nasional)
- Pembinaan seni budaya (pelatihan tenaga pengelola museum Kabupaten/Kota)
- Pengembangan pusat informasi budaya betang bintang patendu, Desa Tumbang Manggo Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan
- Pembinaan seni budaya (festival dan pameran seni budaya pelajar se Kalteng)
- Pembinaan permuseuman (pengadaan peralatan teknis Sub Dinas Kebudayaan)
- Pembinaan permuseuman (pembangunan rumah staf museum negeri kayu Sampit)
- Survei ulang situs betang basaluh Kabupaten Gunung Mas dan situs purbakala Gunung Oke Kabupaten Barito Utara)
- Pembinaan seni budaya (pembinaan group/sanggar seni Kabupaten Kobar dan Pualng Pisau)

Hasil yang telah dicapai pada program-program tersebut di atas antara lain terlaksananya pemberian hadiah sekolah favourit.

## **12) Bidang Sosial**

Pada tahun anggaran 2006 bidang ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.9.572.661.712,00 atau 1,05% dari total Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran secara keseluruhan, anggaran pada bidang ini telah terealisasi sebesar Rp.8.726.594.400,00 atau 0,96% dengan demikian pada bidang ini masih terdapat sisa sebesar Rp.846.067.212,00

Pada bidang ini program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.  
Pada tahun anggaran ini melaksanakan 4 kegiatan yaitu :
  - Rehabilitasi sosial tuna sosial
  - Pembinaan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak terlantantar

- Pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial lanjut usia
  - Rehabilitasi sosial penyandang cacat
- Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.  
Pada tahun anggaran ini melaksanakan 3 kegiatan yaitu :
- Pemerdayaan sosial korban bencana
  - Pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)
  - Bantuan PMI Daerah Kalteng dalam penanggulangan bencana
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.  
Pada tahun anggaran ini melaksanakan 4 kegiatan yaitu :
- Pemberdayaan karang taruna
  - Bimbingan manajemen organisasi karang taruna
  - Pemberdayaan ORSOS/LSM dan organisasi profesi
  - Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial
- Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.  
Pada tahun anggaran ini melaksanakan 2 kegiatan yaitu :
- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan sosial
  - Belanja modal sub kegiatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan sosial
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.  
Pada tahun anggaran ini melaksanakan kegiatan rehab atas dan plafon wisma dan mushala panti STW.  
Hasil yang telah dicapai pada program-program kesejahteraan sosial antara lain tersedianya data komunitas adat terpencil.

### **13)Bidang Pekerjaan Umum**

Pada tahun anggaran 2006 bidang ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.279.578.110.965,00 atau 30,93% dari total Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran secara keseluruhan, anggaran pada bidang ini telah terealisasi sebesar

Rp.276.539.734.160,00 atau 30,59% dengan demikian pada bidang ini masih terdapat sisa sebesar Rp.3.038.376.805,00

Pada bidang ini program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- OP pengairan irigasi dan rawa Provinsi
  - OP pengairan Barito Utara
  - OP pengairan Gunung Mas
  - Pembangunan/peningkatan jaringan pengairan
  - Perencanaan pengembangan sumber daya air Provinsi Kalimantan Tengah
  - OP pengairan Sukamara dan Lamandau
  - OP pengairan Pulang Pisau
  - OP pengairan Seruyan dan Katingan
  - OP pengairan Barito Timur
- 
- Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
- Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan pengendalian banjir dan pengamanan pantai
- 
- Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Peningkatan jalan dan jembatan provinsi di wilayah Kotim-Seruyan-Katingan di Provinsi Kalimantan Tengah
  - Peningkatan jalan dan jembatan provinsi wilayah Pulang Pisau-Kapuas-Barsel-Bartim-Barut di Provinsi Kalimantan Tengah
  - Perencanaan/pengawasan teknis jalan provinsi dan strategisnya
  - Peningkatan jalan dan jembatan provinsi wilayah Kobar-Lamandau-Sukamara di Provinsi Kalimantan Tengah

- Peningkatan jalan dan jembatan provinsi di Provinsi Kalimantan Tengah
  - Peningkatan jalan dan jembatan provinsi wilayah Palangkaraya, Gunung Mas dan Pulang Pisau di Provinsi Kalimantan Tengah
  - Peningkatan jembatan wilayah Gunung Mas dan Pulang Pisau di Provinsi Kalimantan Tengah
  - Peningkatan jembatan wilayah Gunung Mas dan Pulang Pisau di Provinsi Kalimantan Tengah
  - Peningkatan jembatan wilayah Lamandau, Kobar, Sukamara, Seruyan di Provinsi Kalimantan Tengah
  - Peningkatan jembatan wilayah Palangkaraya, Barseel, Barut, Mura di Provinsi Kalimantan Tengah
  - Peningkatan jembatan tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah
- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi wilayah Bartim-Barseel di Provinsi Kalimantan Tengah
  - Pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi Kalimantan Tengah
  - Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi wilayah Gunung Mas di Provinsi Kalimantan Tengah
  - Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi wilayah Barseel dan Bartim di Provinsi Kalimantan Tengah
  - Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi wilayah Kapuas di Provinsi Kalimantan Tengah
  - Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi wilayah Kotim di Provinsi Kalimantan Tengah
  - Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi wilayah Kobar di Provinsi Kalimantan Tengah
  - Pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi wilayah Kotim di Provinsi Kalimantan Tengah
  - Pengadaan peralatan berat UPR UPTD

- Program Pengembangan Perkotaan.  
Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - Perencanaan perkotaan
  - Pembangunan/peningkatan drainase dan jalan lingkungan Kota Palangkaraya
  - Rehabilitasi gedung dan penataan kota
  
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan.  
Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - Peningkatan prasarana dan sarana pedesaan (wilayah barat)
  - Peningkatan prasarana dan sarana pedesaan (wilayah timur)
  
- Program Pengembangan Permukiman Lingkungan.  
Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - OP drainase Kota Palangkaraya
  - OP kebersihan Kota Palangkaraya
  - Pembangunan jaringan penyediaan air bersih pedesaan di Kecamatan Kahayan Tengah dan Banama Tingang
  - Pembangunan jaringan penyediaan air bersih di Kota Palangkaraya
  - Pengadaan 1 buah Dump Truck sampah
  
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik.  
Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - Rapat koordinasi SDA provinsi dan regional
  - Pembinaan, penilaian dan pengendalian kinerja kontraktor di lingkungan PU
  - Pembinaan tenaga pengawas bidang pengairan
  - Pembinaan pengendalian mutu bidang jalan
  - Monitoring dan evaluasi program
  - Rapat teknis/MID TERM REVIEW
  - Rencana umum PSD PU

- Koordinasi dan laporan bidang infrastruktur transportasi, SDA dan pemukiman
- Penyuluhan lakip Dinas PU Provinsi Kalteng
- Harga standar pokok kegiatan (HSPK)
- Draf final program RASK dan DASK DPUP
- Pembelian penunjang kegiatan operasional DPU
- Penyusunan SKPD infrastruktur

Hasil yang telah dicapai pada program-program ini antara lain meningkatnya kualitas jaringan irigasi yang telah dibangun dan meningkatnya prasarana jalan dan jembatan, peningkatan struktur pedesaan.

#### **14) Bidang Perhubungan**

Pada tahun anggaran 2006 bidang ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.21.737.155.191,00 atau 2,40% dari total Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran secara keseluruhan, anggaran pada bidang ini telah terealisasi sebesar Rp.21.267.736.565,00 atau 2,35% dengan demikian pada bidang ini masih terdapat sisa sebesar Rp.469.418.626,00

Pada bidang ini program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

➤ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.

Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Rehab gedung Kantor Dishubtel Provinsi Kalteng (pembangunan tempat parkir, perbaikan halaman kantor dll.)
- Pengadaan sarana penunjang dinas

➤ Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.

Pada tahun anggaran ini melaksanakan kegiatan pengadaan pagar pengaman jalan.

➤ Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ.

Pada tahun anggaran ini melaksanakan kegiatan penertiban/pengawasan lalulintas.

- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.

Pada tahun anggaran ini melaksanakan 2 kegiatan yaitu :

- Lanjutan rehabilitasi rumah jembatan timbang Pasar Panas
- Perbaikan jalan masuk menuju Jembatan Timbang Anjir Serapat km.13

- Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP.

Pada tahun anggaran ini melaksanakan 4 kegiatan yaitu :

- Pengadaan kapal fery/penyebrangan pada ruas jalan Palangkaraya-Buntok
- Pembangunan jalan masuk ke dermaga penyebrangan pada ruas jalan Palangkaraya-Buntok tahap I
- Peningkatan jalan masuk dermaga penyebrangan Kumai tahap I (pendamping APBN)
- Pembangunan gedung operasional dan sirap di Dermaga Tangkiling tahap I

- Program Rehabilitasi dan Prasarana Dermaga, Sungai, Danau dan Penyebrangan.

Pada tahun anggaran ini melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Rehab dermaga sungai di Jenamas Kabupaten Barito Selatan tahap I
- Rehab dermaga Kereng Bangkirai Palangkaraya
- Pembangunan Dermaga Bintang Ninggi di Muara Teweh

- Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Laut.

Pada tahun anggaran ini melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Penyuluhan/sosialisasi aturan perundang-undangan perhubungan laut dan perda
- Monitoring penyelenggaraan pelabuhan Provinsi Kalimantan Tengah
- SID (survey investigation design) pelabuhan laut Bahaur

- Monitoring pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan angkutan laut, kepeda buhanan dan kespel
- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Laut.  
Pada tahun anggaran ini melaksanakan kegiatan rehabilitasi pelabuhan kapal laut perintis di Maluku dan Bahau.
- Program Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan ASDP.  
Pada tahun anggaran ini melaksanakan 3 kegiatan yaitu :
  - Monitoring sarana dan prasarana transportasi SDP wilayah Kalteng
  - Sosialisasi PP, KM dan Perda bidang transportasi SDP
  - Pengawasan dan penertiban transportasi SDP di DAS Kahayan
- Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Udara.  
Pada tahun anggaran ini melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - Sosialisasi pendataan KKOP bandar udara di Kalteng
  - Monitoring kespel, angkutan udara dan performance check prasarana
  - Pembangunan VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya tahap I
  - Pemeliharaan rutin land scape Bandara Tjilik Riwut
  - Latihan gawat darurat bandara/airport emergency plan terpadu seluruh bandara dan instansi terkait
- Program Pengembangan Transportasi Antarmoda.  
Pada tahun anggaran ini melaksanakan 2 kegiatan yaitu :
  - Studi penetapan rencana, pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana LLAJ Kalteng
  - Studi terminal AKAP/AKDP di Palangkaraya Kalteng
- Program Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Pada tahun anggaran ini melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Rakornis perhubungan se Kalteng
  - Pemantauan angkutan lebaran dan tahun baru
  - Monitoring pengawasan program Dinas Perhubungan
  - Monitoring pengawasan tarif angkutan
  - Pengadaan dan pemasangan jaringan internet/LAN dan data Base
- Program Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika.  
Pada tahun anggaran ini melaksanakan kegiatan monitoring, sosialisasi dan penyuluhan.
- Program Pengawasan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.  
Pada tahun anggaran ini melaksanakan kegiatan pengadaan tower antena repearter dengan tinggi 40 meter.  
Hasil yang telah dicapai pada program-program ini antara lain meningkatkan disiplin berlalulintas.

### **15)Bidang Lingkungan Hidup**

Pada tahun anggaran 2006 bidang ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.4.495.814.998,00 atau 0,49% dari total Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran secara keseluruhan, anggaran pada bidang ini telah terealisasi sebesar Rp.4.289.736.362,00 atau 0,47% dengan demikian pada bidang ini masih terdapat sisa sebesar Rp.206.078.636,00

Pada bidang ini program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.  
Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Inventarisasi/pembuatan atlas keanekaragaman hayati (SDA)
  - Pengelolaan pokja jantung borneo
  - Sosialisasi/pelatihan dan penyuluhan dalam rangka peningkatan SDM tentang keanekaragaman hayati
  - Inventarisasi kebakaran hutan dan lahan di 14 Kab./Kota

- Penyusunan leaflet/brosur tentang kebakaran hutan dan lahan
  - Pelaksanaan program penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER) bidang perkebunan
  - Inventarisasi/pendataan usahan pemerintah, swasta dan masyarakat yang dapat merubah fungsi lingkungan di sepanjang DAS
  - Studi penyusunan dokumen dan strategi pembangunan berwawasan lingkungan
- Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.
- Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Pemantauan kualitas air sungai
  - Pemantauan kualitas limbah B3
  - Inventarisasi tingkat kerusakan laut, hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun
  - Pemeliharaan stasiun pemantau kualitas udara
  - Pembuatan database kualitas air sungai
  - Pembuatan tempat parkir/garasi mobil stasiun pemantau kualitas udara ambien
  - Pemantauan kualitas air laut
  - Pengukuran tingkat kebisingan kendaraan bermotor di Kota Palangkaraya
  - Pemantauan kualitas udara ambien bergerak
  - Peningkatan kapasitas BAPEDALDA/BPPLHD dalam pengelolaan dan pembinaan laboratorium lingkungan
  - Pengadaan alat laboratorium lingkungan
  - Sosialisasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
  - Pelatihan pengolahan limbah terpadu di PPLI Jakarta
- Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Pendidikan dan pelatihan lingkungan

- Rapat kerja teknis AMDAL daerah
  - Tinjauan lapangan komisi AMDAL Provinsi
  - Studi banding eksk dan leglt pengelolaan S. Rhine Belanda, Belgia, Luxb, Prancis, Jerman, Swiss dan Australia
  - Sosialisasi modul kurikulum pendidikan, LH untuk SD dan SLTP bagi tenaga pendidik/guru
  - Pertemuan sub regional fire fighting arrangements (SRFA), simulation organizing committee (SOC) dan panel of expert regional asean ke-18
  - Pemantauan program ADIPURA tahap II tahun 2006
  - Pembuatan modul pendidikan LH untuk tingkat SLTA
  - Mengikuti kalender kegiatan LH di Dalam dan Luar Negeri
  - Penyusunan database peraturan dan hukum lingkungan tingkat nasional dan provinsi
  - Pemantauan kasus-kasus lingkungan hidup di Kalteng
  - Sosialisasi, Lokakarya, Workshop kelompok masyarakat profesi pesisir pantai dan laut
  - Studi banding pengelolaan pesisir pantai dan laut
  - Pemantapan pelaksanaan RKL/RPL, oleh wajib AMDAL/UKL/UPL
- Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Penyusunan status lingkungan hidup
  - Penyelenggaraan peningkatan hari-hari besar lingkungan hidup
  - Penyusunan neraca sumber daya alam spasial
  - Evaluasi pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup daerah
  - Mengikuti pameran dalam rangka hari lingkungan hidup di Jakarta
  - Pameran lingkungan hidup daerah
  - Penyusunan buletin dan leaflet lingkungan hidup

- Penyusunan bukupedoman pengemabangan valusi ekonomi dampak pencemaran
- Penyelenggaraan rakorda se Kalteng dan rakor regional se Kalimantan dan Sulawesi

Hasil yang dicapai program-program ini antara lain tersedianya data kualitas air sungai.

#### **16)Bidang Kependudukan**

Pada tahun anggaran 2006 bidang ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.7.488.551.506,00 atau 0,82% dari total Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran secara keseluruhan, anggaran pada bidang ini telah terealisasi sebesar Rp.6.971.145.516,94 atau 0,77% dengan demikian pada bidang ini masih terdapat sisa sebesar Rp.517.405.989,06

Pada bidang ini program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

➤ Program Pengembangan Wilayah Tertinggal.

Pada tahun anggaran ini melaksanakan 16 kegiatan yaitu :

- Penyusunan pedoman identifikasi desa tertinggal
- Rehab gedung kantor dan pagar
- Dampingan teknis berbagai usaha masyarakat
- Inventarisasi penduduk/pemilik lahan terkena program trans serta penduduk masyarakat miskin disekitarnya
- Penyusunan profil desa-desa tertinggal
- Pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan
- Penjajakan calon lokasi pemukiman transmigrasi
- Pembentukan forum komunikasi perencanaan transmigrasi terpadu
- Pembuatan saluran tersier
- Penyelenggaraan koordinasi antar instansi terkait di provinsi dan provinsi dengan kabupaten
- Sosialisasi teknis perencanaan dan kelayakan program transmigrasi
- Study kelayakan RTUPT
- Pengukuran batas keliling lokasi transmigrasi
- Pembinaan dan pemberdayaan warga transmigrasi

- Pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi lokal

Hasil yang telah dicapai pada program pengembangan wilayah antara lain meningkatnya sumber daya masyarakat transmigrasi.

### **17) Bidang Olahraga**

Pada tahun anggaran 2006 bidang ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.8.732.105.927,00 atau 0,96% dari total Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran secara keseluruhan, anggaran pada bidang ini telah terealisasi sebesar Rp8.520.552.577,00 atau 0,94% dengan demikian pada bidang ini masih terdapat sisa sebesar Rp.211.553.350,00

Pada bidang ini program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.  
Pada tahun anggaran ini melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - Rakor kepemudaan di tingkat Kabupaten/Kota
  - Rehab gedung kantor BAPORA bagian belakang dan halaman parkir
  - Koordinasi perencanaan pembinaan kepemudaan
  - Penyusunan buku profil tentang pembinaan generasi muda dan olah raga
  - Penyusunan laporan tahunan, LPJ, program kerja, lakip dan renstra BAPORA
- Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda.  
Pada tahun anggaran ini melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - Penyuluhan narkoba bagi pemuda dan pelatihan TOT narkoba tingkat Provinsi Kalteng
  - Penunjang kegiatan pemuda pelopor
  - Pelatihan ketrampilan pemuda dalam bidang politik
  - Pelatihan ketrampilan pemuda dalam kewirausahaan
  - Dialog pemuda tingkat Provinsi Kalteng
  - Pelatihan ketrampilan pemuda dalam bidang ketrampilan internet

- Penunjang kegiatan drum band Provinsi Kalteng
  - Peringatan hari sumpah pemuda (HSP) tahun 2006
  - Kegiatan pemuda Kwarda Kalteng
  - Kegiatan untuk KNPI dan Rakor OKP
  - Seleksi paskibraka tingkat Provinsi Kalteng tahun 2006
  - TOT paskibraka tingkat Provinsi Kalteng tahun 2006
  - Pembangunan, penataan halaman Sekretariat DPD KNPI
- Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.  
Pada tahun anggaran ini melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional
  - Penyelenggaraan Popda Kalteng tahun 2006
  - Penyelenggaraan Popwil tahun 2006
  - Penunjang kompetisi PSSI Liga Remaja di bawah usia 15 tahun di Makasar tahun 2006
  - Penunjang kegiatan Pengprov PABBSI tahun 2006
  - Pornas II KORPRI tahun 2006 di Palembang
  - Kegiatan Pengda BPOC
  - Seleksi POMNAS Kalteng tahun 2006
  - Pelaksanaan HAORNAS
  - Pelaksanaan kegiatan olahraga dalam rangka hari jadi Kalteng
  - Penunjang kegiatan gerak jalan dalam rangka HAORNAS
  - Pelaksanaan kegiatan olahraga dalam rangka HUT RI
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.  
Pada tahun anggaran ini melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Pembangunan, rehabilitasi Kwarda dan Kwardcab se Kalteng (bertahap)
  - Pembuatan sarana dan prasarana untuk kemah eksekutif
  - Pembangunan dan rehabilitasi Bumi Perkemahan Nyaru Menteng (bertahap)

Hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain terjaringnya atlet-atlet pelajar berprestasi yang akan mewakili Kalteng pada Popwil IX tahun 2007.

### **18) Bidang Kepariwisataan**

Pada tahun anggaran 2006 bidang ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.6.335.431.750,00 atau 0,70% dari total Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran secara keseluruhan, anggaran pada bidang ini telah terealisasi sebesar Rp.5.635.821.850,00 atau 0,62% dengan demikian pada bidang ini masih terdapat sisa sebesar Rp.699.609.900,00

Pada bidang ini program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

➤ Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pada tahun anggaran ini melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pembuatan sinetron Daerah Kalteng
- Lomba design seni kria Kalteng untuk cindramata
- Lomba cita rasa masakan nusantara

➤ Program Pengelolaan keragaman Budaya

Pada tahun anggaran ini melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Festival Budaya Isen Mulang (FBIM)
- Pesta rakyat dalam rangka HUT Kemerdekaan RI
- Paket khusus TMII Jakarta

➤ Program Pengembangan Kemitraan

Pada tahun anggaran ini melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pagelaran seni budaya di Gedung Mandala Wisata
- Pembinaan rumah makan, bar, cafe di Provinsi Kalteng
- Pembinaan hotel di bidang Kantor Depan (front office di Provinsi Kalteng)

➤ Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pameran Nusa Dua Bali (kegiatan promosi bersama antara stok halder Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)
- Pameran Pekan Raya Jakarta (kegiatan promosi bersama antara stok halder Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)
- Pra Rakon W.W.E. di Kaltim (kegiatan promosi bersama antara stok halder Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)
- Penyuluhan pengusaha di 4 Kabupaten/Kota (kegiatan promosi bersama antara stok halder Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)
- PATA Travel exchange Hongkong (kegiatan promosi bersama antara stok halder Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)
- Sarana penunjang dan bahan promosi pencetakan leaflet booklet (kegiatan promosi bersama antara stok halder Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)
- Penunjang fasilitas pagelaran (pagelaran seni budaya di Gedung Mandala Wisata)
- Farmer Santa Parade, Auckland Selandia Baru 2006 (kegiatan promosi bersama antara stok halder Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)
- Pameran promosi di Yogyakarta (kegiatan promosi bersama antara stok halder Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)
- Pembuatan tambah maintenanci website pariwisata Kalteng (kegiatan promosi bersama antara stok halder Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)
- Famer Santa Parade, Auckland Selandia Baru 2005 (kegiatan promosi bersama antara stok halder Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)
- Borneo exchange di Jakarta

➤ Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Pada tahun anggaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Lanjutan pembangunan Betang Sei Pasah di Kapuas
- Lanjutan pembangunan Betang Tjilik Riwut di Bukit Batu

- Evaluasi monitoring pelaksanaan bantuan (pengembangan objek wisata Ujung Pandaran, rehab Sandung di Sei Pasah, pembangunan Balai Basara Tumbang Manggo)
- Pembangunan sarana penunjang objek wisata Danau Bakau di Kabupaten Seruyan
- Penataan situs sejarah eks Pabrik Kayu Brenzoil di Kabupaten Kotim
- Pembangunan rumah situs purbakala Sutaono di Kabupaten Bartim
- Pembuatan VCD lagu daerah dengan latar belakang objek dan daya tarik wisata
- Pemberdayaan Damang Kepala Addta dalam peningkatan promosi kebudayaan daerah
- Rehab ringan Betang Pasar Panas di Kabupaten Bartim
- Pengadaan fasilitas penunjang Kantor Dispersenibud Provinsi Kalteng
- Peningkatan penataan lingkungan Kantor Dispersenibud Provinsi Kalteng

Hasil yang dicapai pada program-program ini antara lain semakin dikenalnya Kalteng dan dapat dijadikan objek wisata.

### **3.4.PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

#### **a. Permasalahan**

Masih terdapat beberapa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang masih mengabaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya tentang batas waktu penyampaian laporan, hal tersebut akan berakibat pada Pengelolaan Keuangan Daerah secara keseluruhan.

Padahal mekanisme yang mengatur tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah telah secara tegas memberikan petunjuk dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, beserta perubahannya secara teknis telah

menggariskan kebijakan dan pengaturan yang baku tentang teknis dan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pada akhirnya bermuara pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Daerah.

Sebagai contoh masih terlihat pada akhir tahun anggaran, Penyetoran sisa Kas pada pemegang Kas SKPD dilakukan setelah melampaui batas waktu tahun berkenaan, sehingga akibat permasalahan itu menghambat perhitungan APBD tahun berkenaan dan juga mempunyai pengaruh pada penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

b. Solusi.

Sebagai solusi mengatasi permasalahan diatas perlu adanya pembinaan dan sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan dan sebagainya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan serta disiplin dari para pejabat Pengelola Keuangan di Daerah.

Mengingat hampir semua pengaturan dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah mulai Tahun Anggaran 2007 adalah sepenuhnya mengacu pada ketentuan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baru yaitu Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.